

UNIVERSITAS INDONESIA



**PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN PEDESAAN DI INDONESIA**

TESIS

NISA ERMA FITRIANA

1806247776

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU EKONOMI
DEPOK
2020**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN PEDESAAN DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salahsatu syarat memperoleh gelar
Magister Sains Ekonomi**

NISA ERMA FITRIANA

1806247776

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Nisa Erma Fitriana
NPM : 1806247776**

Tanda Tangan :

Tanggal : 15 Januari 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nisa Erma Fitriana
NPM : 1806247776
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah
Penduduk Miskin Pedesaan Di Indonesia

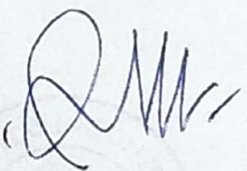
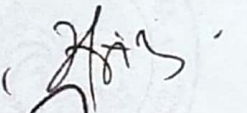
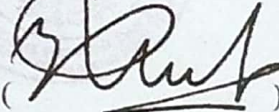
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Riatu Mariatul Qibthiyah, S.E., M.A., Ph.D

Penguji : Diah Widyawati, S.E., M.Sc., Ph.D

Penguji : Rus'an Nasrudin, S.E., MIDEK, Ph.D

()
()
()



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : Januari 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan Di Indonesia**” ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Riatu Mariatul Qibthiyah, S.E., M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Ibu Diah Widyawati, S.E., M.Sc., Ph.D dan Bapak Rus’an Nasrudin, S.E., MIDEK., Ph.D selaku penguji dan *reviewer* yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang membangun bagi penyempurnaan tesis ini;
- 3) Para Dosen Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, terima kasih kepada Bapak/ Ibu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis belajar di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia;
- 4) Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan beasiswa sehingga penulis dapat melanjutkan studi di PPIE;
- 5) Suamiku, Kusuma Endra Gutama, yang telah memberikan doa serta dukungan moral dalam penyusunan tesis ini;
- 6) Keluargaku tercinta, Orang tua, Mertua, Kakak, dan Adikku, terima kasih atas segala support, doa, dan bantuan yang telah diberikan untuk saya dalam penyusunan tesis ini;
- 7) Sahabat-sahabat Bappenas PPIE angkatan 2018 Amanda Petty Soraya, Rinayanti, Wira Wahyuni, Ivana Suprpto, dan Morin Siska yang telah banyak membantu saya dan menemani menyelesaikan tesis ini;

- 8) Seluruh teman-teman PPIE angkatan 2018 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;
- 9) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga adanya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan ilmu ekonomi pada umumnya dan perkembangan ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada khususnya.

Depok, 15 Januari 2020

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Erma Fitriana
NPM : 1806247776
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Pedesaan di Indonesia”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 15 Januari 2020
Yang menyatakan

(Nisa Erma Fitriana)

ABSTRAK

Nama : Nisa Erma Fitriana
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk
Miskin Pedesaan di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Kebijakan ini muncul pertama kali pada era pemerintahan Jokowi -JK sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi ketimpangan antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan dimana dalam kurun waktu 9 tahun terakhir kemiskinan pedesaan selalu lebih besar dari pada kemiskinan perkotaan bahkan berada diatas angka nasional. Kebijakan Dana Desa ini adalah mandat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan. Menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi *fixed effect*, hasilnya menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Pada penelitian ini juga menangkap sumber pedapatan desa lainnya dan faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan.

Kata kunci: dana desa, kemiskinan pedesaan, transfer antar level pemerintah

ABSTRACT

Name : Nisa Erma Fitriana
Study Program: Graduate Programme in Economics
Title : The Effect of Village Fund Policies on the Number of Rural Poor Populations in Indonesia

This study aims to determine the effect of the Village Fund policy on the number of rural poor populations in Indonesia. This policy first appeared in the Jokowi-JK era as one of the central government's efforts in poverty alleviation programs to reduce inequality between rural and urban poverty where in the last 9 years rural poverty has always been greater than urban poverty and even above the national rate . This Village Fund Policy is a mandate from Law No. 6 of 2014 concerning Villages which is a form of state recognition of villages, specifically in the context of clarifying village authority and functions, and strengthening the position of villages and village communities as a development targets. Using panel data from 514 districts / cities in Indonesia from 2010 to 2018 with the fixed effect estimation method, the results show that the Village Fund Policy has an effect in reducing the number of rural poor populations in Indonesia. This research also captures other village income sources and other factors that also have an influence on the number of rural poor populations.

Key words: village fund, rural poverty, intergovernmental transfer

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Dana Desa	11
2.2 Konsep Desentralisasi	13
2.3 Teori Transfer Antar Level Pemerintah	15
2.4 Teori Kesejahteraan Sosial.....	18
2.5 Kemiskinan Absolut	19
2.5.1 Kemiskinan Pedesaan.....	20
2.6 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6.1 Penelitian terdahulu terkait Kemiskinan Pedesaan	22
2.6.2 Penelitian terdahulu terkait Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan	26
2.6.3 Penelitian terdahulu terkait Dana Desa dan Kemiskinan di Indonesia	28
2.7 Kerangka Konseptual	30
2.8 Hipotesis	32
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Spesifikasi Model	33
3.2 Metode Estimasi	37
3.3 Data	39
BAB 4 HASIL PENELITIAN	41
4.1 Gambaran Umum Pedesaan di Indonesia.....	41
4.1.1 Kependudukan Desa.....	41
4.1.2 Tingkat Kemiskinan Desa.....	45
4.1.3 Statistik Keuangan Pemerintah Desa	47

4.1.3.1	Dana Desa	47
4.1.3.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	49
4.2	Keterkaitan Dana Desa dan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan (Analisis Deskriptif)	52
4.3	Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan (Hasil Estimasi)	55
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1 Dua Puluh Kabupaten/Kota Penerima Dana Desa Tertinggi dan Terendah Tahun 2018	45
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian.....	51
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010 - 2018.....	1
Gambar 1.2 Pagu dan Realisasi Dana Desa dan Jumlah Desa Tahun 2015-2018 ...	4
Gambar 1.3 Realisasi Empat Bidang Dana Desa Tahun 2018.....	4
Gambar 1.4 Capaian Output Dana Desa Tahun 2015 - 2018.....	5
Gambar 1.5 Rata-rata Anggaran Dana Desa per Desa Tahun 2015 – 2018.....	7
Gambar 2.1 Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945	14
Gambar 2.2 Kurva <i>Unconditional Grants</i>	15
Gambar 2.3 Kurva <i>Conditional Non-Matching Grants</i>	16
Gambar 2.4 Kurva <i>Social Indifference</i>	18
Gambar 2.5 Hubungan Transfer Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial menurut Rosen dan Gayer (2010).....	28
Gambar 4.1 Total Penduduk Pedesaan Tahun 2010 - 2018	37
Gambar 4.2 Perbandingan Penduduk Desa Laki-laki dan Perempuan di Indonesia menurut Pulau Tahun 2018	37
Gambar 4.3 Penduduk Desa menurut Kelompok Umur Tahun 2018	38
Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Pedesaan Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2018	39
Gambar 4.5 Tenaga Kerja Pertanian dan Non Pertanian Pedesaan Tahun 2015 - 2018.....	40
Gambar 4.6 Persentase Kemiskinan Pedesaan di Indonesia menurut Pulau Tahun 2014-2018	41
Gambar 4.7 Perbandingan Penduduk dan Penduduk Miskin Desa di Indonesia menurut Pulau Tahun 2018	42
Gambar 4.8 Realisasi Dana Desa per Pulau Tahun 2015-2018	44
Gambar 4.9 Sumber Pendapatan Desa terhadap Pendapatan Desa Tahun 2015-2018	46
Gambar 4.10 Realisasi APBDES Tahun 2015-2018	47
Gambar 4.11 Pemetaan Dana Desa Tahun 2015 dan Tingkat Kemiskinan Pedesaan Tahun 2016	48

Gambar 4.12 Pemetaan Dana Desa Tahun 2016 dan Tingkat Kemiskinan Pedesaan Tahun 2017	49
Gambar 4.13 Pemetaan Dana Desa Tahun 2017 dan Tingkat Kemiskinan Pedesaan Tahun 2018	48
Gambar 4.14 Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2010-2018	56

DAFTAR LAMPIRAN

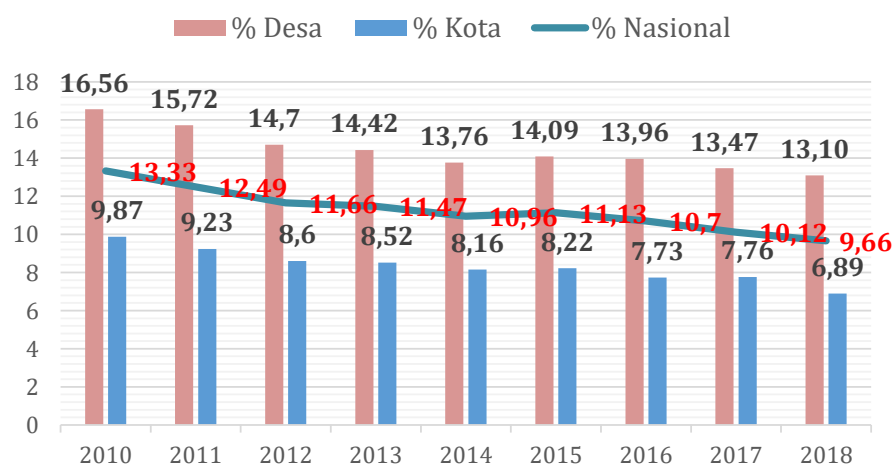
Lampiran 1 Analisa Pemilihan Model	76
Lampiran 2 Hasil Estimasi Regresi Model Terbaik dengan STATA	80
Lampiran 3 Statistik F dengan Membandingkan Dua Model	83
Lampiran 4 <i>Robustness Check</i>	84

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu hal yang selalu menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. (Seabrook, 2006). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Namun setelah 74 tahun merdeka, kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, laju kemiskinan nasional selalu mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk pada kategori miskin pada tahun 2010 mengalami penurunan dari 31 juta jiwa menjadi 25.6 juta jiwa pada tahun 2018 atau sekitar 9.66% pada September 2018. Itu artinya, dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin nasional berkurang sekitar 5 juta jiwa. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir angka kemiskinan nasional cenderung menurun, namun masih dibutuhkan solusi untuk mengatasi tingkat kemiskinan di pedesaan yang memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan di perkotaan seperti terlihat pada grafik Gambar 1.1



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2018

Sumber: BPS 2019

Berdasarkan data Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Gambar 1.1, angka kemiskinan penduduk pedesaan lebih besar jika dibandingkan dengan perkotaan bahkan nasional. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin desa pada 2018 yaitu sebesar 13.10%. Persentase tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perkotaan yaitu sebesar 6.89%. Persentase penduduk miskin di pedesaan juga berada diatas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada level 9.66% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah penduduk miskin di pedesaan antara lain pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, tingkat upah minimum, dan lain sebagainya.

Dalam literatur empiris terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan pedesaan seperti penelitian Fan et al. (2000) dan Zhang et al. (2004) yang beranggapan investasi pemerintah pada infrastruktur pedesaan seperti jalan desa dan irigasi serta pendidikan memiliki pengaruh pada penurunan kemiskinan pedesaan. Higgins (2012) beranggapan kebijakan transfer oleh pemerintah cenderung memiliki dampak yang lebih tinggi pada tingkat kemiskinan pedesaan daripada perkotaan. Selanjutnya menurut Ahluwalia (2007), Datt & Ravallion (1998), dan Pandey & Reddy (2012) menunjukkan bahwa produktivitas pertanian yang lebih tinggi membawa keuntungan bagi rumah tangga miskin pedesaan. Disisi lain, Padda & Hameed (2018) dan Aref (2011) menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang lebih tinggi akan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Pemerintah memiliki berbagai program pengentasan yang terpadu dimulai dari program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan pelaku usaha kecil, yang dijalankan berbagai tingkat pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan yaitu pemerintah telah menetapkan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah berupa otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan

sumber-sumber pembiayaan, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah pusat dapat melimpahkan kebijakan dan kewenangannya pada pemerintah daerah.

Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dari sisi belanja (*expenditure*) didefinisikan sebagai suatu proses penyaluran anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi pemerintah dalam hal pelayanan publik (Kurniasih, 2013). Adanya kewenangan tersebut didasarkan pada pertimbangan dapat menurunkan ketimpangan baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan dan menunjukkan adanya hasil yang berlawanan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Valaris, 2012; Adefeso, 2017; Balisacan dan Pernia, 2002; Faridi dan Nasar, 2013). Penelitian lainnya beranggapan bahwa desentralisasi fiskal tidak dapat menyelesaikan kemiskinan (Azfar dan Livingston, 2012; Moche et al., 2014; Hernandez, 2016; Agegnehu dan Dibu, 2017; Bird dan Rodriguez, 1999; Jutting et al., 2004).

Pada era pemerintahan Jokowi-JK, terdapat kebijakan desentralisasi fiskal yaitu berupa Dana Desa sebagai mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa tersebut merupakan wujud program Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI”. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

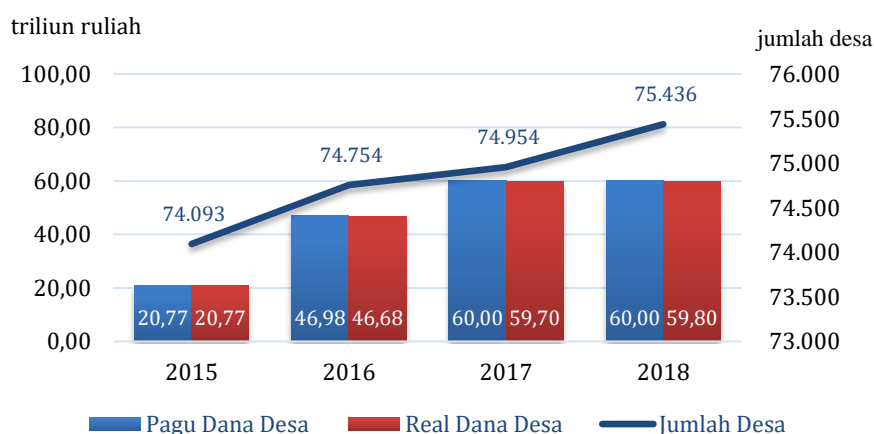
Pada awal kemunculan kebijakan Dana Desa tahun 2015, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 247/PMK.07/2015 formula distribusi Dana Desa

untuk setiap kabupaten/kota dialokasikan sesuai prinsip pemerataan dan berkeadilan (PP 60/2014) yang terdiri dari Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan bobot masing-masing sebesar 90% dan 10%. Alokasi Dasar merupakan porsi alokasi yang dibagi sama rata ke kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa di kabupaten/kota. Sedangkan Alokasi Formula sebesar 10% dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penelitian yang dilakukan Lewis (2015) yang berjudul *“Decentralising To Villages In Indonesia: Money (And Other) Mistakes”* berpendapat bahwa terdapat ketidakefektifan dalam formula pengalokasian Dana Desa. Penelitian ini menangkap dua fokus kesalahan utama dalam formula penganggaran Dana Desa. Pertama, terdapat prosedur yang salah dimana Alokasi Dasar menjadi mayoritas dalam formulasi Dana Desa, sedangkan Alokasi Formula yang melihat karakteristik tiap daerah hanya diberikan porsi kecil yaitu sebesar 10%. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki heterogenitas yang tinggi, sebagai contoh geografis yang berbeda antar pulau. Kedua, dalam proses penganggaran Dana Desa mengabaikan sumber pendapatan desa lainnya yang masuk ke pemerintah desa. Menggunakan regresi logistik penelitian ini bertujuan untuk melihat variabel penyusun Dana Desa terhadap kesalahan alokasi Dana Desa. Proksi kesalahan alokasi Dana Desa didapat berdasarkan selisih antara alokasi Dana Desa aktual yang didistribusikan pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota dan alokasi Dana Desa ideal dengan Alokasi Formula menjadi mayoritas dikurangi kapasitas fiskal desa. Kesalahan alokasi Dana Desa bernilai positif jika alokasi Dana Desa aktual lebih besar dari alokasi Dana Desa ideal yang selanjutnya diasumsikan sebagai pemenang dan bernilai negatif jika sebaliknya. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen dalam jumlah desa dan kapasitas fiskal desa akan meningkatkan peluang menjadi pemenang sebesar 44 poin dan 24 poin. Disisi lain, 1 persen peningkatan populasi desa, tingkat kemiskinan desa, luas lahan desa, dan indeks kesulitan geografis akan mengurangi peluang menjadi pemenang masing-masing sebesar 76 persen, 22 persen, 62 persen, dan 98 persen. Berdasarkan hasil ini jelas terlihat bahwa kabupaten/kota akan mendapat porsi Dana Desa lebih

besar ketika memiliki jumlah desa lebih banyak dan kapasitas fiskal desa yang besar.

Meskipun penelitian yang dilakukan Lewis (2015) berargumen terdapat ketidakefektifan dalam segi penganggaran, namun kebijakan Dana Desa telah menjadi program pengentasan kemiskinan berbasis desa terbesar dari pemerintah pusat dibandingkan dengan program-program pengentasan kemiskinan lainnya seperti subsidi raskin, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan, atau PKH (Program Keluarga Harapan). Kebijakan Dana Desa merupakan komitmen pemerintah pusat untuk menempatkan Desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, pemerintah pusat setiap tahunnya telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1b) seperti yang terlihat pada Gambar 1.2.

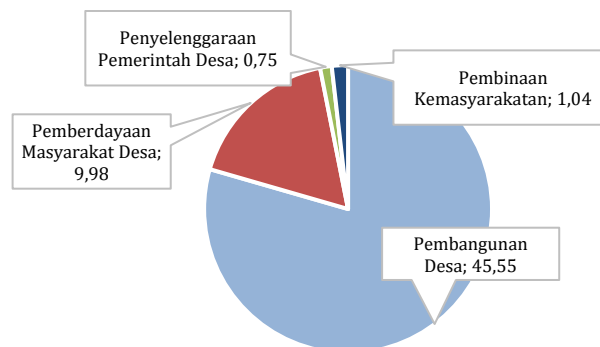


Gambar 1.2 Pagu dan Realisasi Dana Desa dan Jumlah Desa Tahun 2015-2018

Sumber: DJPK Kemenkeu 2019.

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, anggaran Dana Desa selalu mengalami peningkatan dari Rp 20.7 triliun pada tahun 2015, Rp 46.98 triliun pada tahun 2016, dan Rp 60 triliun untuk tahun 2017 dan 2018 dengan rata-rata capaian realisasi anggaran selalu berada diatas 99%. Dengan anggaran tersebut, maka masyarakat desa mempunyai kesempatan untuk mengelola sumber daya dan potensi

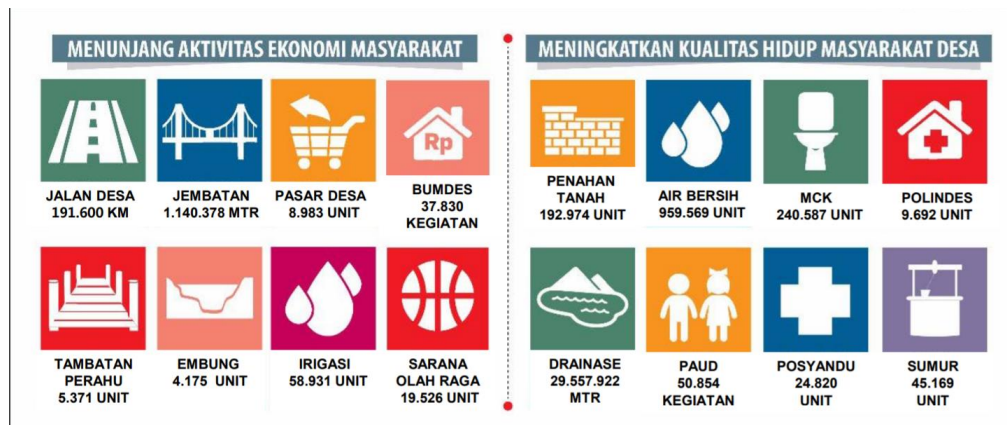
yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.



Gambar 1.3 Realisasi Empat Bidang Dana Desa Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)

Sumber: Ditjen PPMD Kemedesa 2019.

Menurut Pasal 19 ayat 2 PP No 60 Tahun 2014 penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terlihat pada Gambar 1.3 diatas, pada tahun 2018, hampir 76% dari realisasi anggaran Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial dasar, sarana prasarana ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu, sebanyak Rp 9.98 triliun anggaran Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Gambar 1.4 Capaian Output Dana Desa Tahun 2015 - 2018

Sumber: Ditjen PPMD Kemendes 2019

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dalam kurun waktu 2015-2018, capaian output Dana Desa telah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat desa melalui sarana/prasarana yang telah terbangun seperti terlihat pada Gambar 1.4. Pembangunan sarana/prasarana diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Desa dan diharapkan semakin memperkecil ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan.

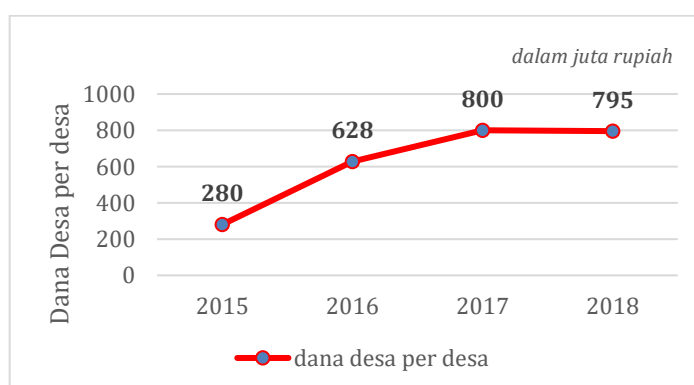
Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa penelitian terkait Desa Desa dan hubungannya dengan kemiskinan. Terdapat hasil yang berbeda dalam literatur empiris. Beberapa penelitian menunjukkan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan (Anam, 2017; Hermawan et al., 2019; Rahma et al., 2019). Hal ini karena Dana Desa mampu merangsang dan bahkan memberikan kontribusi besar untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan, dan dapat menikmati pengembangan infrastruktur desa dalam mendukung perekonomian di desa (Hermawan, 2019). Sedangkan penelitian lain beranggapan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan (Ekayuliana et al., 2018).

Kunci sukses dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pembangunan desa adalah dengan adanya inovasi, kreativitas, serta

kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan tujuan bersama. Pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, namun dibutuhkan adanya peran aktif, dukungan, dan inisiasi dari masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan tantangan besar yang selalu dihadapi oleh berbagai bangsa pada proses pembangunan ekonomi, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Permasalahan terkait kemiskinan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Todaro (2015) menyatakan bahwa konsentrasi kemiskinan sebageaian besar berada di area pedesaan. Data BPS menunjukkan pada tahun 2018 kemiskinan di pedesaan berada pada level angka 13,10%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan yaitu sebesar 6,89%. Dengan adanya fakta bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan, setiap kebijakan yang ditetapkan untuk mengurangi kemiskinan seharusnya sebagian besar diarahkan untuk membangun pedesaan. Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Adanya Undang-Undang Desa telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengalokasi Dana Desa sebagai salah satu langkah pengentasan kemiskinan di pedesaan. Menurut PP 60/2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.



Gambar 1.5 Rata-rata Anggaran Dana Desa per Desa Tahun 2015 – 2018

Sumber : DJPK Kemenkeu dan BPS 2019, data diolah

Berdasarkan Gambar 1.5 anggaran Dana Desa per desa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dikarenakan Dana Desa pada tahun 2017 dan 2018 memiliki besaran yang sama namun dengan jumlah desa yang berbeda. Jumlah desa pada tahun 2017 yaitu sebanyak 74.954 desa sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 75.436 desa (Potensi Desa BPS, 2018).

Adanya kebijakan Dana Desa dimana anggaran tersebut ditujukan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota dan sesuai dengan kedudukan desa yang berada di wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penelitian ini akan mencoba melihat pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan pada level kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melihat secara empiris bagaimana pengaruh dari kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Adanya kebijakan Dana Desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa berupa pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis keterkaitan antara pengaruh Dana Desa dengan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia dalam periode 2010 sampai dengan 2018 dengan unit analisis adalah 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan Dana Desa secara resmi dimulai pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jumlah penduduk miskin pedesaan sebagai variabel dependen. Variabel interest yang digunakan yaitu Dana Desa yang diukur menggunakan nilai

realisasi Dana Desa tiap kabupaten/kota. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan metode panel data.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas 5 (lima) Bab yang saling berkaitan agar dapat memberikan penjelasan yang sistematis dan dapat dipahami, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai teori sebagai tinjauan pustaka yang terkait dengan topik penelitian ini meliputi pengertian dan dasar hukum Dana Desa, Konsep Desentralisasi, Teori Transfer Antar Level Pemerintah, Teori Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan Absolut, dan mengulas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang akan menjelaskan data dan sumber data, metode analisis penelitian, definisi operasional dari tiap variabel yang dipilih.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan analisis deskriptif untuk mengetahui spesifikasi data yang digunakan dalam penelitian, mengulas analisis pengaruh variabel-variabel penelitian dengan menampilkan hasil estimasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini yang merupakan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Dana Desa

Kebijakan Dana Desa merupakan amanat dari UU 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dituangkan dalam program prioritas Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa juga dilakukan untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya bertujuan untuk: 1) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, 2) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan 3) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Tujuan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mendukung program pembangunan desa, menurut UU 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki 7 sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Dana Desa yang merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanahkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*). Alokasi tersebut akan

didistribusikan ke seluruh desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan yang kemudian diimplementasikan dalam formula distribusi alokasi Dana Desa dengan bobot Alokasi Dasar:Alokasi Formula = 90:10 pada tahun 2015-2017. Pada tahun 2018 pola penggaran Dana Desa berubah menjadi Alokasi Dasar: Alokasi Afirmasi: Alokasi Formula = 77:3:20. Alokasi Dasar merupakan porsi alokasi yang dibagi sama rata ke desa-desa tujuan. Selanjutnya Alokasi Afirmasi merupakan anggaran bagi desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi. Sedangkan Alokasi Formula dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk sebesar 10%, jumlah penduduk miskin sebesar 50%, luas wilayah sebesar 15%, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 25%.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 (yang telah berubah sebanyak dua kali terakhir yaitu PP Nomor 8 Tahun 2016) mengatur penyaluran Dana Desa secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota melanjutkan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang penyaluran dana desa dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60 persen di bulan Maret dan tahap kedua sebesar 40 persen di bulan Agustus yang mulai diimplementasikan pada tahun 2016. Penyaluran dana desa dilakukan dengan syarat telah ditetapkannya: 1) peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, 2) APBD kabupaten/kota, dan 3) APBDes.

Ruang lingkup penggunaan Dana Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan prioritas Dana Desa yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menurut PP 60/2014. Secara lebih rinci, prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI yang diterbitkan setiap tahun. Presiden menginstruksikan bahwa program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan model *cash for work*. Prinsip skema *cash for work* antara lain:

- Bersifat Swakelola, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara internal mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak eksternal;
- Menggunakan sebanyak banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja (*labor intensive*) dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja;
- Menggunakan bahan baku atau material setempat (*local content*).

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang yang lebih besar kepada desa untuk meningkatkan peranannya. Masyarakat desa merupakan subjek pembangunan diharapkan dapat mendorong prakarsa, gerakan, dan ikut serta dalam mengembangkan potensi dan aset desa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Disamping itu, melalui pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggungjawab diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian masyarakat desa yang selanjutnya dapat mengatasi kesenjangan pembangunan perkotaan dan pedesaan .

2.2 Konsep Desentralisasi

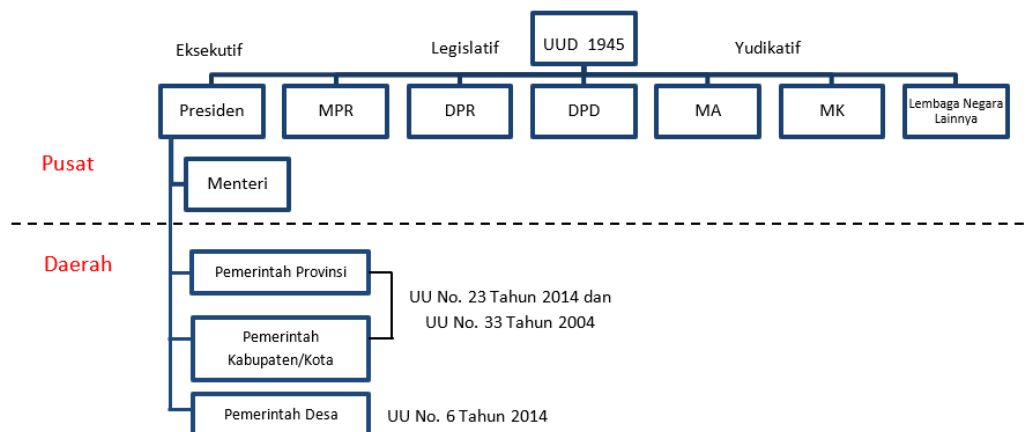
Pemerintah pada umumnya terdiri dari beberapa tingkatan, misalnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom diperhatikan dalam dua aspek, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran anggaran. Adanya hubungan yang antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun desa dapat menimbulkan konsekuensi adanya transfer keuangan antar pemerintahan (Khusaini, 2006).

Von Braun dan Grote (2000) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer kekuasaan dan tanggung jawab untuk fungsi publik dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Sedangkan konsep desentralisasi fiskal menurut De Mello (2001) adalah melakukan pemindahan atau penyerahan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Sejauh ini terdapat tiga dimensi dasar desentralisasi yang ditemukan dalam literatur yaitu politik, administrasi, dan fiskal (Schneider, 2003). Schneider (2003) mengkonseptualisasikan dan memeriksa dimensi yang berbeda ini berdasarkan pengukuran empiris menggunakan data lintas negara. Rincian setiap dimensi desentralisasi adalah sebagai berikut:

- Desentralisasi politik memberi masyarakat lokal dan perwakilan mereka kewenangan yang lebih besar dalam segala jenis pengambilan keputusan, termasuk menetapkan standar dan kerangka kerja hukum, dan juga pemilihan umum yang memengaruhi otoritas politik.
- Desentralisasi administratif atau kelembagaan yaitu mendistribusikan kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya diantara berbagai tingkatan pemerintahan.
- Desentralisasi fiskal mencakup kewenangan untuk meningkatkan pendapatan atau akses ke transfer dan mengambil keputusan tentang pengeluaran saat ini. Dalam jenis desentralisasi ini, transfer antar level pemerintah memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan fiskal untuk mengurangi ketidaksetaraan sumber daya antar daerah. Menurut Yao (2007) transfer antar level pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup untuk mendanai tanggung jawab pengeluaran mereka. Transfer ini biasanya dalam bentuk hibah dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, transfer ini dapat dilakukan dengan syarat atau tanpa syarat dimana ketentuan tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia terhitung dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sampai saat ini kedua peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami revisi, yang terakhir adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



Gambar 2.1 Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945

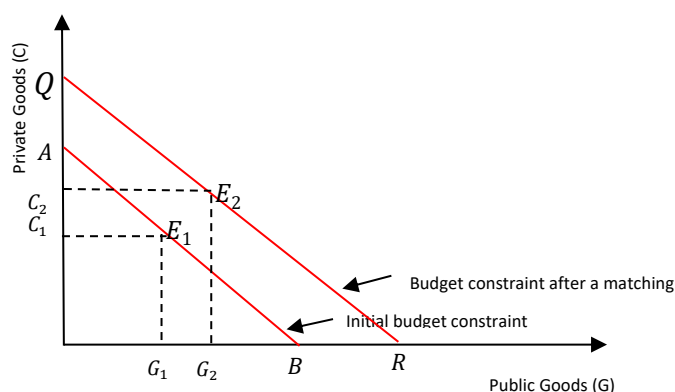
Sumber : Kementerian Dalam Negeri 2019

Dengan adanya revisi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah melakukan penguatan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dari perspektif penyempurnaan mekanisme pembiayaan, pemerintah juga memberikan atensi yang tak kalah seriusnya, kebijakan Dana Desa sebagai mandat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi bukti teranyar komitmen tersebut, seperti terlihat dalam bagan ketatanegaraan pada Gambar 2.1.

2.3 Teori Transfer Antar Level Pemerintah

Sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah adalah pendapatan pajak (*tax revenue*) dan transfer antar pemerintah (*intergovernmental transfer*) (Bergvall et al, 2006). Adapun tujuan transfer antar level pemerintah ini yaitu untuk pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horisontal (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengarahkan prioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru (*experimenting with new ideas*), stabilisasi, dan kewajiban untuk mewujudkan tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah (Fuad, 2004).

Rosen dan Gayer (2010) membagi transfer antar level pemerintah ke dalam dua jenis transfer yaitu: transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) dan transfer bersyarat (*conditional grants*). Transfer tidak bersyarat (*unconditional grants/ general purpose grants/ block grants*) merupakan transfer yang tidak ada pembatasan pada penggunaan alokasi dana oleh pemerintah daerah namun tetap berada dibawah pengawasan pemerintah pusat. Transfer tidak bersyarat dapat disebut juga *revenue sharing* atau *lump sum grants* untuk pemerintah daerah yang menerimanya dan merupakan dana pendukung pelaksanaan program/proyek pembangunan yang menjadi prioritas daerah, serta memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan antar daerah. Gambar 2.2 menjelaskan mengenai dana transfer tidak bersyarat, dimana sumbu horizontal adalah barang publik yang disediakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari output barang publik yang akan dikonsumsi oleh masyarakat; sedangkan sumbu vertikal menunjukkan barang privat yang merupakan total belanja masyarakat setelah dikurangi pajak (Rosen dan Gayer, 2010).



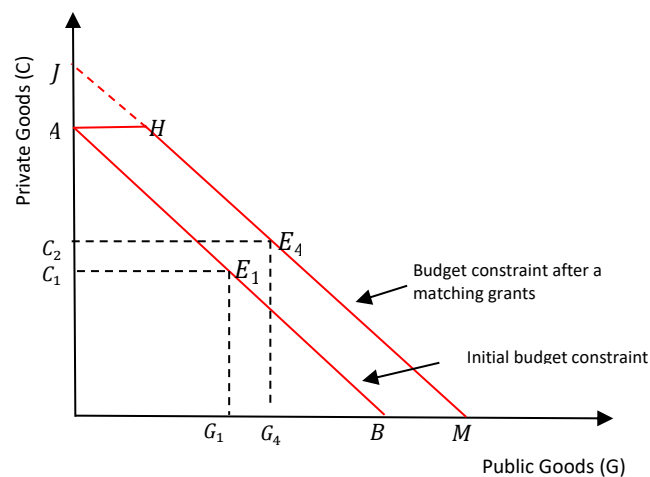
Gambar 2.2 Kurva *Unconditional Grants*

Sumber : Rosen dan Gayer (2010)

Pada Gambar 2.2, kurva anggaran penerima transfer meningkat sejumlah dana yang diberikan ($C_1C_2 = G_1G_2$), dimana *budget line* akan berubah dari AB (sebelum menerima transfer) ke QR (setelah menerima transfer).

Transfer bersyarat (*conditional grants/ specific purpose grants/ categorical grants*) merupakan transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

dimana pemerintah pusat mengatur pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Pemerintah pusat menentukan tujuan spesifik dalam penggunaan dana transfer bersyarat tersebut. Transfer bersyarat dari pemerintah pusat biasanya digunakan untuk program yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Transfer bersyarat dibagi menjadi *matching grants* dan *non-matching grants*. Baik *matching grants* dan *non-matching grants* merupakan transfer dimana setiap unit uang yang diberikan oleh pendonor digunakan untuk mendukung aktivitas tertentu yang disesuaikan dengan perencanaan dan tujuan yang telah dibuat oleh pendonor. Penerima transfer tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk aktivitas lainnya. Yang menjadi perbedaan, *matching grants* menggunakan dana pendamping dari daerah penerima transfer, sedangkan *non-matching grants* merupakan jenis transfer yang tidak menggunakan dana pendamping dari daerah penerima transfer.



Gambar 2.3 Kurva *Conditional Non-Matching Grants*

Sumber: Rosen dan Gayer (2010)

Pada gambar 2.3 diatas menunjukkan bagaimana pemerintah pusat memberikan transfer sebesar AH kepada pemerintah daerah dimana pemerintah pusat telah menentukan tujuan spesifik penggunaan dana. Adanya transfer tersebut akan menyebabkan adanya *income effect* (Stiglitz, 2015). Pada sisi pemerintah daerah, institusi menerima tambahan anggaran yang dapat digunakan penyediaan barang publik yang dapat diakses oleh masyarakat lokal. *Budget line AHM*

menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi barang publik karena adanya penambahan tranfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Jika melihat jenis transfer antar level pemerintah diatas, maka Dana Desa diklasifikasikan sebagai *conditional non-matching grants*. Sebab dalam penyaluran Dana Desa tidak terdapat dana pendamping yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna mendukung kebijakan Dana Desa. Selain itu, pemerintah pusat telah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2.4 Teori Kesejahteraan Sosial

Todaro (2015) mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (welfare) dengan persamaan sebagai berikut:

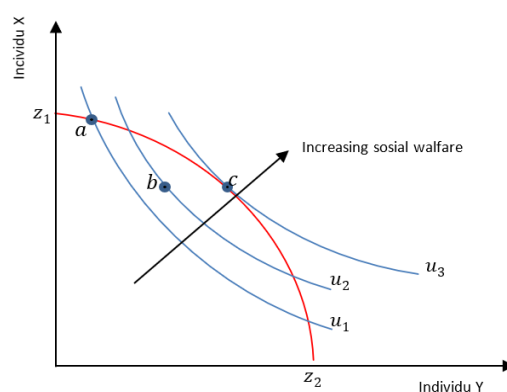
$$W = W(Y, I, P)$$

Dimana Y adalah pendapatan perkapita, I adalah ketimpangan dan P adalah kemiskinan absolut. Berkaitan dengan fungsi kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda, dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan.

Dalam ekonomi sering digunakan fungsi kesejahteraan sosial untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam hal ukuran kepuasan (*utilities*) setiap individu. Fungsi kesejahteraan sosial berguna ketika kita ingin mengevaluasi kebijakan yang mempengaruhi beberapa anggota masyarakat secara berbeda dari yang lain. Setiap fungsi kesejahteraan sosial dapat dikaitkan dengan pandangan tertentu tentang keadilan.

Menurut Rosen dan Gayer (2010) fungsi kesejahteraan sosial merupakan sebuah fungsi yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang bagaimana kepuasan individu memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kriteria pareto adalah sebuah keadaan yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Keadaan pareto dapat dijelaskan melalui pendekatan kurva *Production Possibility Frontier* (PPF) dimana kurva ini mewakili jumlah output efisien dalam perekonomian yang dapat diperoleh dengan jumlah input tertentu. Kemiringan pada kurva PPF ini merupakan laju transformasi marginal antara X dan Y yang menunjukkan peningkatan output X dapat terjadi ketika jumlah Y harus menurun, keadaan ini disebut pareto efisien.



Gambar 2.4 Kurva *Social Indifference*

Sumber: Rosen dan Gayer (2010).

Seluruh output sepanjang titik z_1 z_2 pada Gambar 2.4 diatas menunjukkan keadaan yang pareto efisien. Titik a adalah sebuah keadaan yang tidak diinginkan oleh perekonomian dikarenakan titik tersebut berada di bawah kurva indiferen u_2 yang berarti memiliki tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih rendah walaupun berada dalam keadaan pareto efisien, seperti halnya titik b, walaupun memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, namun tidak dalam keadaan pareto efisien. Titik c merepresentasikan tingkat kesejahteraan sosial yang tepat dalam perekonomian karena titik tersebut berada dalam keadaan pareto efisien dan tingkat kesejahteraan yang paling baik.

2.5 Kemiskinan Absolut

Tingkat kemiskinan absolut dikategorikan sebagai sejumlah orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Todaro (2015) tingkat kemiskinan absolut dihitung sebagai jumlah total orang yang hidup dibawah

minimum pendapatan riil yang telah ditentukan garis kemiskinan internasional. Dalam menghitung tingkat garis kemiskinan absolut, Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan pengeluaran konsumsi masyarakat yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity/Paritas Daya Beli*). Hal tersebut bermanfaat untuk menentukan kemana sumber daya finansial disalurkan dan menganalisis kemajaun dalam memerangi kemiskinan. Bank Dunia telah menetapkan garis kemiskinan sebesar US\$ 1 PPP (PPP\$ tahun 1985) perkapita per hari. Namun dalam praktiknya garis kemiskinan lain telah digunakan oleh Bank Dunia dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membedakan antara tingkat kemiskinan di negara maju, berkembang, dan transisi. Misalnya, garis kemiskinan US\$ 2 PPP perkapita per hari telah disarankan untuk Amerika Latin dan Karibia yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara di Asia dan Afrika, dan US\$ 4 PPP (PPP\$ tahun 1990) untuk negara-negara Eropa Timur dan Bekas Uni Soviet (UNDP, 2000).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai kemiskinan yang mutlak terjadi pada suatu masyarakat yang memiliki standar hidup minimum dan diwujudkan kedalam sebuah garis kemiskinan. Definisi mengenai standar hidup minimum menurut BPS tergantung pada pembentukan garis kemiskinan. Sehingga kemiskinan absolut dapat diartikan sebagai perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang dalam hal mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, rumah, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum didefinisikan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Sehingga garis kemiskinan diartikan sebagai nilai minimum kebutuhan dasar. Penduduk miskin digolongkan sebagai penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan.

2.5.1 Kemiskinan Pedesaan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, tetapi juga mencakup faktor-faktor non-pendapatan seperti kurangnya akses ke layanan, infrastruktur, sumber daya

sosial, dan lain sebagainya. Kemiskinan juga dapat memberikan dampak seperti kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, akses air dan sanitasi yang buruk. Fenomena ini sangat mudah ditemukan di daerah pedesaan di negara-negara berpenghasilan rendah dimana sebagian besar orang miskin tinggal. Fakta lain yaitu aliran bantuan resmi ke daerah pedesaan selama periode ini telah menurun dan dukungan terhadap ekonomi pedesaan seperti pembangunan pertanian telah melambat (Okidegbe, 2001). Selain itu fokus utama kemiskinan absolut bukan di daerah pedesaan, tetapi sebagian besar pengeluaran pemerintah diarahkan ke daerah perkotaan terutama pada sektor manufaktur modern dan komersial (Todaro, 2015).

Data dari perhitungan World Bank di negara berkembang, 500-700 juta orang miskin tinggal di daerah pedesaan. Kemajuan dalam mengatasi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan mengalami kelambatan. Data menunjukkan selama periode 1997-1998, porsi bantuan yang diberikan oleh internasional terhadap negara miskin yang sedang berkembang tetap berada disekitar angka 63% (Okidegbe, 2001). Data menurut International Fund for Agricultural Development (IFAD), sebesar 52% dari masyarakat miskin pedesaan negara berkembang terdiri dari rumah tangga petani kecil (banyak terdapat di daerah dengan curah hujan rendah, tanah rapuh dan rentan terhadap erosi), 24% dengan rumah tangga tak bertanah, 7% masyarakat dengan suku asli, 6% pengembala nomaden, 4% nelayan kecil, dan 6% pengungsi internal (Nafziger, 2006).

Pembangunan ekonomi sektor pertanian dianggap memainkan peranan peran pasif dan suportif. Tujuannya untuk menyediakan bahan makanan yang murah dan tenaga kerja untuk ekonomi industri yang berkembang karena dianggap sebagai sektor yang strategis dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Todaro, 2015). Jelas setiap pendekatan untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi harus menekankan pembangunan pedesaan dan distribusi pendapatan pedesaan, termasuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin pedesaan. Agar hal ini terjadi, maka negara berkembang khususnya pada daerah pedesaan membutuhkan peningkatan akses ke sumber daya produktif, tanah dan modal, serta teknologi (Nafziger, 2006).

Sebagian besar pembangunan ekonomi khususnya sektor pertanian di pedesaan pada umumnya memainkan peran dalam kemajuan ekonomi secara keseluruhan terutama pada negara berkembang yang berpendapatan rendah. Strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan lapangan kerja membutuhkan 3 elemen, yaitu: (1) percepatan pertumbuhan pengeluaran melalui teknologi, kelembagaan, dan harga yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani pada tingkat menengah kebawah, (2) meningkatnya permintaan domestik untuk hasil pertanian yang berasal dari strategi pembangunan perkotaan berorientasi pekerjaan, (3) kegiatan pembangunan pedesaan yang beragam, nonpertanian, padat karya yang secara langsung dan tidak langsung mendukung dan didukung oleh komunitas pertanian (Todaro, 2015).

2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Penelitian terdahulu terkait Kemiskinan Pedesaan

Beberapa penelitian terdahulu terkait kemiskinan pedesaan telah dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi kemiskinan di pedesaan. Penelitian-penelitian ini menangkap determinan dari kemiskinan pedesaan dalam berbagai perspektif dan metode.

Penelitian yang dilakukan Fan et al. (2000) dan Zhang et al. (2004) dengan menggunakan model persamaan simultan menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur pedesaan seperti jalan desa dan irigasi serta pendidikan memiliki pengaruh pada penurunan kemiskinan pedesaan. Fan et al. (2000) memperkirakan dampak langsung dan tidak langsung dari berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan pedesaan dan pertumbuhan produktivitas di India. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk mengurangi kemiskinan pedesaan, pemerintah harus memberikan prioritas tertinggi pada investasi jalan pedesaan dan program penelitian pertanian. Jenis-jenis investasi ini tidak hanya memiliki dampak pengurangan kemiskinan yang jauh lebih besar per unit uang yang dihabiskan daripada investasi pemerintah lainnya, tetapi juga menghasilkan pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan Zhang et al. (2004) memperkirakan berbagai efek pengeluaran pemerintah terhadap produksi dan kemiskinan pedesaan. Dengan menggunakan data tingkat provinsi pada tahun

1953–2000, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi yang meningkatkan produksi, seperti R&D pertanian dan irigasi, pendidikan pedesaan, dan infrastruktur (termasuk jalan, listrik, dan telekomunikasi), semuanya berkontribusi pada pertumbuhan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan pedesaan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki dampak terbesar kedua pada pengurangan kemiskinan.

Selanjutnya Higgins (2012) melakukan analisa apakah kebijakan transfer pemerintah “*Bolsa Familia*” di Brazil cenderung untuk memiliki dampak yang lebih tinggi di daerah pedesaan daripada perkotaan. Menggunakan model probit, hasilnya menunjukkan bahwa kemiskinan telah menurun sejak tahun 2003 menurut semua ukuran kemiskinan yang biasa digunakan, dan transfer pemerintah telah memainkan peran penting dalam proses ini. Secara khusus, program transfer tunai bersyarat *Bolsa Familia* menyebabkan antara 12 s.d 18 persen penurunan dalam indeks jumlah orang miskin, dan penurunan antara 24 s.d 31 persen dalam indeks kesenjangan kemiskinan pada tahun 2009. Banyak dari rumah tangga miskin di pedesaan keluar dari kemiskinan dengan adanya program ini. Sama hal dengan penelitian yang dilakukan Agostini et al. (2010), penelitian ini berargumen transfer tunai memiliki dampak yang sangat bervariasi terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan di berbagai daerah di Chile. Menggunakan data panel, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan 1 poin persentase dalam rasio transfer tunai pemerintah untuk barang dan jasa terhadap total pengeluaran dikaitkan dengan penurunan kemiskinan di daerah pedesaan (signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen) sebesar 4,3 persen.

Penelitian Ahluwalia (2007), Datt & Ravallion (1998), dan Pandey & Reddy (2012) menunjukkan bahwa produktivitas pertanian yang lebih tinggi membawa keuntungan bagi rumah tangga miskin pedesaan. Menurut Pandey & Reddy (2012), peningkatan 10 persen dalam produktivitas lahan akan mengurangi kemiskinan sebesar 4,3 persen. Disisi lain, Datt & Ravallion (1998) mengemukakan adanya hasil pertanian yang tinggi berdampak pada peningkatan permintaan akan tenaga kerja yang secara langsung berdampak pada pendapatan perkapita penduduk desa. Pengurangan kemiskinan pedesaan akan membutuhkan strategi pembangunan

yang tepat dan intervensi khusus melalui penggambaran daerah yang tepat dan penetapan prioritas penelitian dan pembangunan.

Surhayadi et al. (2009) dan Jiandong et al. (2016) menganalisa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan. Terdapat hasil yang berlawanan pada kedua penelitian ini. Dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan teknik *Generalized Least Square (GLS)*, hasil penelitian Surhayadi et al. (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan pada sektoral tertentu berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, namun tidak semua komponen sektoral dari pertumbuhan ekonomi berkontribusi setara terhadap pengurangan kemiskinan. Menurut penelitian ini, pertumbuhan di sektor layanan berpengaruh pada pengurangan kemiskinan, karena pertumbuhan 1% dari sektor ini terkait dengan pengurangan kemiskinan sebesar 1,3%. Sedangkan penelitian yang dilakukan Jiandong et al. (2016) menganggap bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan GDP tidak dapat menyelesaikan kemiskinan pedesaan. Menggunakan fungsi distribusi pendapatan multi-parameter dan teori decoupling untuk menyelidiki kemiskinan pedesaan di Cina. Selain itu ditemukan bahwa penduduk lansia merupakan salah satu faktor mengapa angka kemiskinan di pedesaan China tetap tinggi. Penduduk lansia telah kehilangan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan, yang akan menghambat Cina dalam mengurangi populasi penduduk miskin di masa depan. Maka pemerintah China perlu memperbaiki sistem asuransi bagi pensiunan di pedesaan. Selain itu perlunya investasi pada sistem kesehatan untuk penduduk lansia dan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lansia.

Padda & Hameed (2018) memperkirakan tingkat kemiskinan di 19 distrik di pedesaan Pakistan yang akan digunakan sebagai sebuah kontribusi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian memperkirakan kemiskinan multidimensi dengan menggunakan metode *principal component analysis (PCA)* di tingkat distrik di pedesaan Pakistan. Studi ini menemukan bahwa 44% rumah tangga di pedesaan Pakistan hidup dalam kemiskinan, mengalami kekurangan air minum murni, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, kondisi perumahan yang buruk, sumber energi yang tercemar, dan kekurangan sumber daya ekonomi. Bukti

menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan berhubungan negatif dengan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dana tambahan harus dialokasikan untuk kesejahteraan sosial, pendidikan, sanitasi, persediaan air, dan pengembangan pertanian di daerah pedesaan. Penelitian yang dilakukan Aref (2011) di 12 desa di Abadeh Tashk, Iran menunjukkan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan menggunakan analisis kualitatif. Selain itu pendidikan juga memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus multi-target dan diharapkan akan menunjukkan dimensi yang luas dan beragam. Solusi untuk kemiskinan pedesaan harus mencakup berbagai disiplin ilmu dan harus mencakup faktor ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan.

Otsuka & Takashi (2008) menggunakan set data panel panjang rumah tangga pedesaan di Asia (Filipina, Thailand, Bangladesh, dan India) dan set data cross-sectional di Afrika Timur (Kenya, Uganda, dan Ethiopia) menunjukkan pengaruh tenaga kerja pedesaan terhadap pengurangan kemiskinan jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan namun tidak secara signifikan, mengingat menurunnya pendapatan upah pertanian di Asia dan Afrika Timur. Namun peningkatan pendapatan tenaga kerja non-pertanian merupakan faktor penentu dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan, karena telah mengurangi kesenjangan pendapatan antara rumah tangga yang kaya lahan dan miskin lahan, antara pekerja yang berpendidikan dan tidak, serta antara daerah pertanian yang kurang dan lebih menguntungkan. Selain itu, pasar tenaga kerja jelas tersegmentasi sesuai dengan tingkat sekolah, yang secara kritis mempengaruhi pilihan pekerjaan dan pendapatan dari tenaga kerja pedesaan. Sama halnya dengan Macours & Swinnen (2005) menunjukkan adanya dampak perubahan yang drastis dan beragam pada alokasi tenaga kerja yang berpengaruh pada perbedaan kemiskinan desa/kota dan lebih mencerminkan reaksi peluang rumah tangga yang beragam. Peningkatan akses lahan di sejumlah negara dengan produksi pertanian padat karya akan mendorong migrasi dari perkotaan ke pedesaan yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja pertanian. Di negara-negara Azerbaijan, Armenia, dan Georgia, di mana peningkatan tenaga kerja pertanian yang kuat dan terjadi selama periode distribusi

lahan akan mengurangi dampak guncangan ekonomi negatif terhadap kemiskinan pedesaan. Akses langsung ke lahan berkontribusi pada pergeseran ke arah produksi padat karya dan ternak. Keuntungan hasil yang cepat dan kuat di pertanian padat karya mengurangi guncangan pendapatan negatif dan mengurangi kemiskinan pedesaan.

2.6.2 Penelitian terdahulu terkait Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan

Selanjutnya dari beberapa variabel yang memiliki pengaruh pada pengentasan kemiskinan di pedesaan, peneliti mencoba untuk melihat kembali secara lebih spesifik hubungan transfer pemerintah dalam sistem desentralisasi terhadap penurunan kemiskinan dari beberapa penelitian terdahulu. Studi-studi ini telah menangkap korelasi antara desentralisasi fiskal dan pengurangan kemiskinan dari berbagai perspektif dan metode. Beberapa penelitian menangkap adanya dampak positif hubungan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan, namun beberapa penelitian lainnya memperlihatkan dampak negatif desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Valaris (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan negatif antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan pada 48 negara bagian di Amerika Serikat. Menggunakan data panel dengan model estimasi *fixed effect*, penelitian ini menunjukkan bahwa trend desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sejalan dengan Adefeso (2017) yang melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui pengaruh kebijakan federalisme fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Nigeria di 36 negara bagian dan ibukota Federal. Dengan menggunakan data *cross-section*, hasil penelitian menunjukkan pengaturan federalisme fiskal di Nigeria memiliki hubungan negatif dengan indeks kemiskinan yang konsisten dengan teori desentralisasi. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran daerah, semakin rendah tingkat kemiskinan di seluruh negara bagian. Balisacan dan Pernia (2002) mengidentifikasi dampak infrastruktur pada sektor ekonomi dan sosial. Menggunakan data panel level provinsi pada tahun 1980 dan 1990 dengan metode estimasi *three-stage least square*, penelitian ini menunjukkan bahwa transfer

pemerintah pada investasi jalan, terutama ketika disertai dengan investasi di sekolah, memiliki efek signifikan (baik langsung maupun tidak langsung) pada kesejahteraan orang miskin di Filipina. Pendapatan rata-rata orang miskin naik 0,32 persen karena peningkatan akses jalan 1 persen, ditambah dengan akses ke sekolah. Penelitian Faridi dan Nazar (2013) mengestimasi dampak otonomi fiskal terhadap kemiskinan di Pakistan, menggunakan data panel dengan model estimasi OLS dari tahun 1972 – 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam pengeluaran dan pendapatan berguna dalam mengurangi kemiskinan. Temuan ini berpendapat bahwa rasio pengeluaran provinsi terhadap pendapatan provinsi yang disesuaikan memiliki dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar kebebasan fiskal lebih banyak diberikan di tingkat provinsi dan daerah, karena pemerintah provinsi dan daerah dianggap lebih mengetahui informasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Beberapa penelitian lain telah menyimpulkan bahwa desentralisasi memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan dan pemberian layanan yang berpihak pada masyarakat miskin. Azfar dan Livingston (2002) tidak menemukan bukti efisiensi dan kesetaraan yang membaik pada penyediaan layanan publik lokal dengan adanya program desentralisasi di Uganda. Dengan menggunakan regresi OLS, penelitian ini menunjukkan hasil permintaan akan layanan publik imunisasi yang sedikit dimana layanan dasar ini merupakan layanan yang sangat penting disediakan untuk umum, yang terkenal efisien dari segi biaya. Moche et al. (2014) mengestimasi hubungan dinamis antara desentralisasi fiskal dengan tingkat kemiskinan di Afrika Selatan. Menggunakan data panel dengan model estimasi *Generalized Method of Moments* (GMM), hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak jangka pendek yang negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga yang menyiratkan peningkatan kemiskinan. Namun perkiraan tersebut tidak signifikan. Secara keseluruhan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal justru meningkatkan kemiskinan di Afrika Selatan, meskipun hal ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena penggunaan data sampel yang terbatas. Hernandez (2016) mengestimasi hubungan dinamis antara anggaran sosial infrastruktur terhadap program pengentasan

kemiskinan di Meksiko. Dengan menggunakan 2454 kota tahun 2000 dan 2010 hasilnya menunjukkan bahwa anggaran sosial infrastruktur tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Disisi lain indeks akuntabilitas berpengaruh dalam tingkat kemiskinan, penelitian ini berpendapat semakin akuntabilitas birokrasi maka program anti kemiskinan akan semakin efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berhubungan erat dengan sukses tidaknya program pengentasan kemiskinan.

Beberapa penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menunjukkan hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan. Agegnehu dan Dibu (2017) melakukan analisis dampak penerapan kebijakan desentralisasi di Etiopia pada tahun 2000 terhadap tingkat kemiskinan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Etiopia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan pengaturan kelembagaan yang lemah dan tidak memadainya pemberdayaan pemerintah daerah. Bird dan Rodriguez (1999) melakukan penelitian tentang pengalaman desentralisasi di Argentina, Chili, Kolombia, Indonesia, Vietnam, dan khususnya Filipina. Mereka menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mengurangi kemiskinan secara signifikan dan bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Jutting et al. (2004) melakukan studi kasus pada 19 negara untuk menguji asumsi bahwa desentralisasi mendorong pengurangan kemiskinan. Namun, mereka juga menemukan hal ambigu dimana hubungan desentralisasi dan pengurangan kemiskinan tidak dapat dibangun. Di beberapa negara miskin yang ditandai oleh institusi yang lemah dan konflik politik, desentralisasi dapat memperburuk keadaan.

2.6.3 Penelitian terdahulu terkait Dana Desa dan Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa penelitian terkait Kebijakan Dana Desa dan tingkat kemiskinan. Anam (2017) melakukan analisa untuk mengetahui dampak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan data *cross section* tahun 2016, hasilnya menunjukkan bahwa tranparansi, akuntabilitas, dan variabel dana desa berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Studi yang dilakukan pada 53 desa di Bangkalan menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan turun apabila dana desa per kapita mengalami penambahan mencapai Rp1,3 jt per kapita atau lebih setiap tahunnya.

Hermawan et al. (2019) untuk menganalisis pengaruh penerapan desentralisasi fiskal dalam bentuk dana desa terhadap jumlah kemiskinan di daerah pedesaan di tingkat provinsi di Jawa. Menggunakan data panel tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi *fixed effect*. Hasil menunjukkan Dana desa memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan pedesaan. Peningkatan dana desa sebesar 1 persen, kemiskinan akan berkurang sebesar 0,0093 persen. Hal ini karena Dana Desa mampu merangsang dan bahkan memberikan kontribusi besar untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan, dan dapat menikmati pengembangan infrastruktur desa dalam mendukung perekonomian desa.

Rahma et al. (2019) mengukur dampak kontribusi kebijakan pemerintah terhadap paradigma 'membangun Indonesia dari pinggiran', yaitu kontribusi Dana Desa, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan desa di Indonesia. Menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2017, hasilnya menunjukkan bahwa dana desa secara optimal melawan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan implementasi Dana Desa, desa melakukan manajemen dalam pengelolaan kegiatan yang dikelola sendiri yang melibatkan masyarakat desa itu sendiri serta pelaksanaan dan perencanaan kegiatan ini secara mandiri. Temuan penting ini memberi seberapa besar pengaruh independensi desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup.

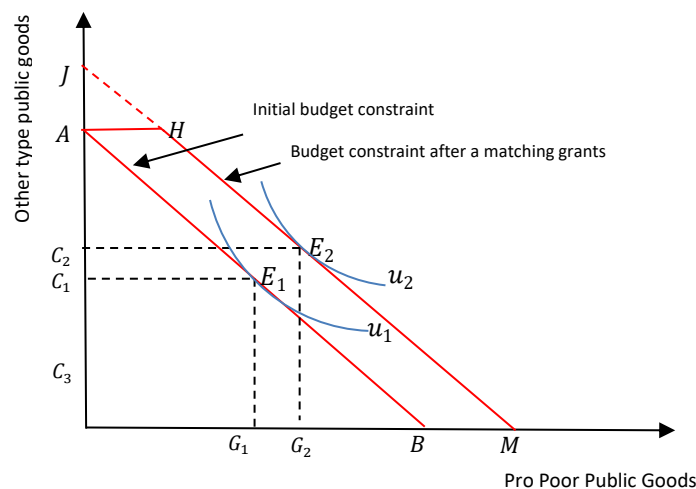
Ekayuliaya et al. (2018) menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur. Populasi penelitian ini adalah desa-desa di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berupa dana desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena dana desa untuk infrastruktur lebih tinggi penggunaannya

daripada untuk pemberdayaan dimana pemberdayaan langsung menyentuh target orang miskin sehingga mereka bisa mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan literatur empiris, sudah cukup banyak penelitian bertemakan desentralisasi terhadap kemiskinan dan sudah terdapat beberapa penelitian terkait Dana Desa di Indonesia namun beberapa diantara penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus daerah tertentu untuk melihat pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Disisi lain, belum terdapat penelitian yang khusus membahas tema kemiskinan di pedesaan dimana sebagian besar masyarakat miskin berada. Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah terdapat pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan menggunakan data level kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018. Dengan adanya penelitian dengan cakupan kabupaten/kota di Indonesia, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan informasi mengenai pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia.

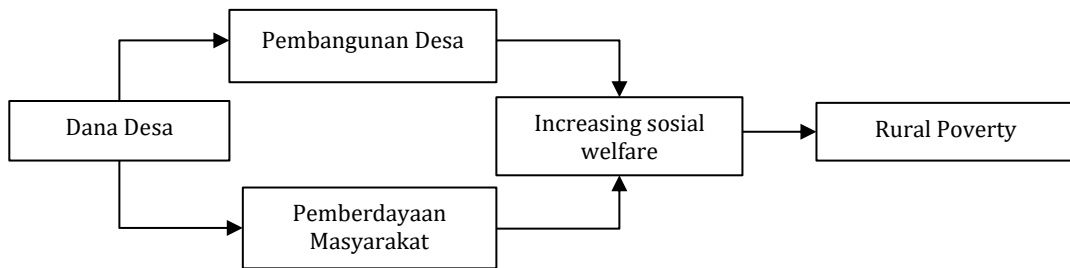
2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka teori pada penelitian ini dibangun berdasarkan teori transfer antar level pemerintah dan teori kesejahteraan sosial yang dikembangkan oleh Rosen dan Gayer (2010). Berdasarkan kualifikasi jenis transfer pada sistem desentralisasi pada subbab 2.3 diatas, maka Dana Desa diklasifikasikan sebagai *conditional non-matching grants*. Sebab dalam penyaluran Dana Desa tidak terdapat dana pendamping yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa guna mendukung kebijakan Dana Desa, dan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah.



Gambar 2.5 Kurva Hubungan Transfer Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial menurut Rosen dan Gayer (2010)

Gambar 2.5 menunjukkan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah sebesar AH. Dana transfer tersebut menyebabkan adanya *income effect* untuk pemerintah daerah, dimana instansi memperoleh tambahan anggaran yang dapat digunakan penyediaan barang publik yang dapat diakses oleh masyarakat lokal. Adanya dana transfer akan mengubah garis anggaran dari AB menjadi AHM yang berarti terdapat peningkatan barang publik lokal dari G_1 ke G_2 . Barang publik lokal tersebut merupakan infrastruktur dan layanan publik dasar yang dibutuhkan penduduk lokal terutama masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat berdampak pada peluang orang untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Dengan adanya peningkatan barang publik maka akan meningkatkan kesejahteraan sosial dimana tingkat kesejahteraan sosial sebelum adanya transfer pemerintah digambarkan dengan kurva indifferen u_1 dan setelah adanya transfer pemerintah terjadi peningkatan kesejahteraan sosial ke u_2 .



Gambar 2.6 Kerangka pemikiran analisis pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan.

Dengan begitu terlihat bahwa sejauh dana transfer diprioritaskan untuk pembangunan daerah yang berupa layanan publik yang efisien yang dapat diakses oleh penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa maka terdapat ruang untuk mengurangi kemiskinan (Todaro, 2015).

2.8 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan empiris, hipotesis dalam penelitian ini adalah Kebijakan Dana Desa berhubungan negatif dengan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Model

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dijelaskan dan tujuan dari penelitian ini, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} POV_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 DD_{it-1} + \alpha_2 ADD_{it-1} + \alpha_3 rasio_PAD_{it-1} + \alpha_4 BK_{it-1} + \\ & \alpha_5 APBD_{it-1} + \alpha_6 rasio_BM_{it-1} + \alpha_7 PDRB_{it} + \alpha_8 growth_popdes_{it} + \\ & \alpha_9 popdes_{it} + \alpha_{10} rasio_labor_{it} + \alpha_{11} rasio_old_{it} + \alpha_{12} educ_{it} + \alpha_{13} raskin_{it} + \\ & \beta_1 Dyear_t + \beta_2 Dpulau_tahun_{it} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

(Model 1)

dimana i menunjukkan kabupaten/kota dan t menunjukkan periode penelitian yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Variabel tak bebas (dependen) POV merupakan jumlah penduduk miskin pedesaan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa salah satu tujuan utama penyelenggaraan program kebijakan Dana Desa yaitu penanggulangan kemiskinan. Variabel bebas (independen) DD yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Desa, variabel ini untuk melihat pengaruh kebijakan secara menyeluruh di Indonesia.

Studi ini menambahkan beberapa variabel kontrol untuk mengendalikan sebanyak mungkin heterogenitas yang tidak teramati dalam model. Pendapatan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (BK) merupakan dana transfer terbesar yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ke pemerintah desa selain Dana Desa. Menurut Higgins (2012) transfer pemerintah telah memainkan peran sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan pedesaan. Sedangkan Pendapatan Asli Desa digunakan untuk melihat pengaruh kemandirian fiskal suatu desa dalam program pengentasan kemiskinan.

Variabel kontrol tentang kependudukan seperti $growth_popdes$, $popdes$, $rasio_labor$, $rasio_old$, $educ$ digunakan melihat bagaimana pola kependudukan berpengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan. Variabel $growth_popdes$ dan $popdes$ masing-masing menunjukkan laju pertumbuhan penduduk desa dan jumlah

penduduk desa. Variabel *rasio_labor* menunjukkan rasio tenaga kerja sektor pertanian terhadap tenaga kerja non pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian secara teoritis memiliki pengaruh kuat pada penciptaan lapangan pekerjaan (Xavier et al, 2001). Semakin tinggi penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian maka produksi hasil pertanianpun akan semakin banyak sehingga penjualan dari hasil pertanian akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk desa. Sedangkan variabel *rasio_old* menunjukkan rasio penduduk usia lanjut desa yang memasuki usia 60 tahun keatas terhadap penduduk desa dan variabel *educ* menunjukkan jumlah penduduk desa yang telah mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Semakin banyak penduduk usia lanjut maka produktivitas penduduk desa akan semakin menurun yang diduga berdampak pada aktivitas perekonomian desa. Disisi lain pendidikan akan meningkatkan kesempatan individu dalam mendapatkan pekerjaan.

Untuk melihat pengaruh karakteristik perekonomian Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan dalam penelitian ini menggunakan variabel PDRB Kabupaten/Kota, APBD Kabupaten/Kota (Sisi Penerimaan), dan Rasio Belanja Modal terhadap pengeluaran daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol program anti kemiskinan dari pemerintah pusat lainnya yang berupa Raskin (beras untuk masyarakat miskin) untuk melihat pengaruh program tersebut ke variabel dependen dalam penelitian.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikatr yang membentuknya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi	Sumber Data	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Variabel Dependen	Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai kemiskinan yang mutlak terjadi pada suatu masyarakat yang memiliki	Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS Tahun :	orang

Jumlah penduduk miskin pedesaan (POV)	standar hidup minimum dan diwujudkan kedalam sebuah garis kemiskinan BPS mengkategorikan seseorang sebagai penduduk miskin jika memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	2010-2018	
Variabel Independen Utama Dana Desa (DD)	Menurut PP 60/2014 Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun : 2015-2018	miliar rupiah
Variabel Kontrol Alokasi Dana Desa (ADD)	Menurut PP 72/2005 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.	Badan Pusat Statistik Tahun: 2010-2018	miliar rupiah
Variabel Kontrol Rasio Pendapatan Asli Desa (rasio_PAD)	Menurut UU 6/2014 Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Variabel PAD merupakan rasio PAD terhadap pendapatan desa.	Badan Pusat Statistik Tahun: 2010-2018	persen
Variabel Kontrol Bantuan Keuangan (BK)	Menurut UU 6/2014 Bantuan Keuangan merupakan dana transfer yang berasal APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota	Badan Pusat Statistik Tahun: 2010-2018	miliar rupiah
Variabel Kontrol APBD Kabupaten/Kota Sisi Penerimaan (APBD)	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun : 2010-2018	miliar rupiah
Variabel Kontrol Rasio Belanja Modal terhadap Pengeluaran Kabupaten/Kota (rasio_BM)	Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun : 2010-2018	persen
Variabel Kontrol	BPS mendefinisikan PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (<i>gross value</i>	BPS Tahun :	miliar rupiah

PDRB Kabupaten/Kota (PDRB)	<i>added</i>) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.	2010-2018	
Variabel Kontrol Laju Pertumbuhan Penduduk Desa (growth_popdes)	BPS mendefinisikan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.	Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS Tahun : 2010-2018	persen
Variabel Kontrol Penduduk Desa (popdes)	BPS mendefinisikan Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.	Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS Tahun : 2010-2018	orang
Variabel Kontrol Rasio Tenaga Kerja (rasio_labor)	BPS mendefinisikan penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Variabel Tenaga Kerja dalam penelitian ini merupakan rasio tenaga kerja sektor pertanian terhadap tenaga kerja sektor non pertanian	Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) BPS Tahun : 2010-2018	persen
Variabel Kontrol Rasio Penduduk Usia Lanjut terhadap total penduduk (rasio_old)	BPS mendefinisikan penduduk Usia Lanjut adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia)	Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS Tahun : 2010-2018	persen
Variabel Kontrol Tingkat Pendidikan (educ)	Menurut UU 20/2003 Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Variabel Pendidikan dalam penelitian ini merupakan jumlah penduduk desa yang telah mengikuti program wajib belajar 12 tahun setara SMA	Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS Tahun : 2010-2018	orang
Variabel Kontrol Beras Masyarakat Miskin (raskin)	Beras untuk Rumah Tangga Miskin Variabel Raskin dalam penelitian ini merupakan jumlah penduduk desa yang pernah membeli/menerima beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra).	Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS Tahun : 2010-2017	orang

3.2 Metode Estimasi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat signifikansi, besar, dan arah hubungan dana desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian akan menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan periode tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan model estimasi *fixed effect*. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar kabupaten/kota, perbedaan intersep bisa terjadi karena karakteristik setiap kabupaten kota baik penduduk ataupun geografisnya. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program STATA MP 14.2. Untuk melakukan pengujian hipotesis dan pemelihan model dalam penelitian akan dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut:

- **Pengujian Restriksi Persamaan Linier dengan Pendekatan Uji F (Gujarati, 2016)**

Uji F-statistik secara umum digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model persamaan yang digunakan secara bersamaan signifikan memengaruhi variabel dependen. Nilai F-statistik yang besar merupakan nilai yang lebih baik dibandingkan F-statistik yang bernilai rendah. Berikut merupakan hipotesis pada pengujian restriksi persamaan linier dengan pendekatan uji F :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i = 0 \quad (\text{model } \textit{restricted} \text{ atau terbatas})$$

$$H_1 : \text{minimal ada salah satu } \beta_i \neq 0 \quad (\text{model } \textit{unrestricted} \text{ atau tidak terbatas})$$

Selanjutnya bagaimana kita membandingkan antara regresi yang tidak terbatas dan yang terbatas yaitu dengan menetapkan uji F seperti berikut:

$$F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)} \quad (3.2.1)$$

Mengikuti distribusi F dengan m, df(n-k). dimana :

$$R_{UR}^2 = \text{RSS (Residual Sum of Squares) dari model } \textit{unrestricted}$$

R_R^2 = RSS (*Residual Sum of Squares*) dari model *restricted*
 m = jumlah restriksi linier
 k = jumlah parameter dalam regresi yang tidak terbatas
 n = jumlah observasi

Catatan yang perlu diperhatikan adalah dalam menggunakan persamaan (3.2.1) perlu diingat bahwa jika variabel dependen pada model regresi yang tidak terbatas dan regresi terbatas tidak sama maka R_{UR}^2 dan R_R^2 tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Setelah didapat nilai F dengan menggunakan persamaan (3.2.1), gunakan Aturan Pengambilan Keputusan : Jika nilai F hitung melebihi nilai $F_{\alpha}(m,n-k)$, dimana $F_{\alpha}(m,n-k)$ adalah nilai F kritis pada tingkat signifikansi α maka tolak H_0 sehingga model terbaik adalah model *unrestricted*, selain itu kita tidak tolak H_0 .

▪ **Keofisien Determinasi R^2 (Gujarati, 2016)**

Nilai koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 dapat ditemukan dengan rumus:

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} \quad (3.2.2)$$

dimana:

RSS = *Residual Sum of Squares*
 TSS = *Total Sum of Squares*

Nilai R^2 didefinisikan berada di antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 mendekati satu atau satu, maka variabel dependen dapat dijelaskan dengan garis regresi. Akan tetapi, terdapat hal yang perlu diperhatikan dengan R^2 . Pertama, nilai ini mengukur *goodness of fit* di dalam sampel dalam pengertian seberapa dekat sebuah nilai Y dengan nilai aktualnya pada sebuah sampel. Kedua, dalam membandingkan dua atau lebih R^2 , variabel dependen harus sama. Ketiga, dan yang paling penting, sebuah R^2 tidak dapat berkurang ketika lebih banyak variabel ditambahkan kedalam model. Tentu saja dengan menambahkan lebih banyak variabel ke dalam model dapat meningkatkan nilai R^2 , tetapi hal ini juga dapat meningkatkan varians dari

kesalahan forecasting.

Sebagai hukuman bagi penambahan variabel-variabel dalam model untuk meningkatkan R^2 dalam model, Henry Theil membangun adjusted R^2 (adj R^2) dilambangkan $\overline{R^2}$ dimana

$$\overline{R^2} = 1 - \frac{RSS/(n-k)}{TSS/(n-1)} = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k} \quad (3.2.3)$$

Seperti yang dapat dilihat dari rumus diatas bahwa $\overline{R^2} \leq R^2$, menunjukkan bagaimana adj R^2 memberikan hukuman untuk penambahan lebih banyak variabel. Tidak seperti R^2 , adj R^2 akan meningkat hanya jika nilai t absolut dari variabel yang ditambahkan bernilai lebih besar dari 1 sehingga untuk kepentingan perbandingan, adj R^2 adalah ukuran yang lebih baik daripada R^2 .

3.3 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan dengan unit analisis penelitian pada level kabupaten/kota dan periode penelitian dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah mencerminkan pedesaan.

Variabel Dependen kemiskinan yang berupa jumlah penduduk miskin pedesaan diperoleh dengan mengolah data yang berasal dari Modul Konsumsi Susenas BPS. Data penduduk miskin ini didapat dengan mengkategorikan individu-individu yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan yang berada dibawah garis kemiskinan kabupaten/kota. Data individu-individu yang sudah masuk kategori penduduk miskin dengan klasifikasi desa tersebut diberikan bobot individu untuk selanjutnya diagragasikan ke level kabupaten/kota.

Variabel Independen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Desa dan variabel kontrol keuangan adalah Alokasi Dana Desa, Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa, Bantuan Keuangan, APBD

Kabupaten/Kota, dan Rasio Belanja Modal terhadap pengeluaran daerah Kabupaten/Kota. Seluruh variabel keuangan pada penelitian ini terdapat lag pertama dengan pertimbangan bahwa dampak transfer pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan tidak dapat dilihat langsung dalam periode sama. Disisi lain penggunaan lag pertama pada variabel keuangan yaitu mengakomodir periode publikasi Susenas yang berada pada bulan Maret tahun berjalan sedangkan realisasi keuangan baru terlihat pada akhir tahun berjalan.

Variabel yang menunjukkan karakteristik kabupaten/kota ditunjukkan dengan PDRB. Variabel PDRB yang digunakan merupakan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota yang berasal dari publikasi BPS Tinjauan Regional berdasarkan PDRB Kabupaten_Kota.

Variabel yang melihatkan kependudukan desa seperti laju pertumbuhan penduduk desa (*growth_popdes*), penduduk desa (*popdes*), rasio penduduk usia lanjut terhadap total penduduk desa (*rasio_old*), tingkat pendidikan (*educ*) diperoleh menggunakan data Susenas BPS. Variabel rasio tenaga kerja sektor pertanian terhadap tenaga kerja non pertanian (*rasio_labor*) diperoleh menggunakan data Sakernas dengan mengkategorikan individu-individu dengan klasifikasi desa yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu lalu dengan lapangan usaha/bidang pekerjaan sektor pertanian. Selanjutnya individu yang sudah masuk kategori tersebut diberikan bobot individu untuk selanjutnya diagregasikan pada leve kabupaten/kota. Variabel rasio penduduk usia lanjut diperoleh dengan mengkategorikan penduduk klasifikasi desa dengan usia 60 tahun keatas dibagi total penduduk desa, sedangkan tingkat pendidikan mencerminkan penduduk desa yang telah mengikuti wajib belajar 12 tahun yang telah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

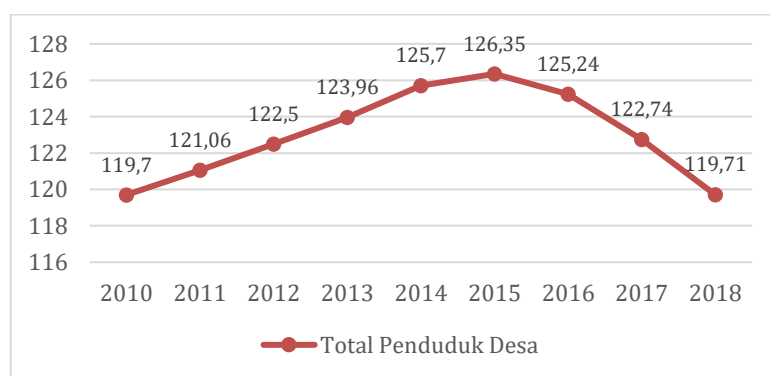
Variabel raskin diperoleh dengan mengkategorikan penduduk klasifikasi desa yang pernah membeli/menerima beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra) selanjutnya diagregasikan pada level kabupaten/kota.

BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Pedesaan di Indonesia

4.1.1 Kependudukan Desa

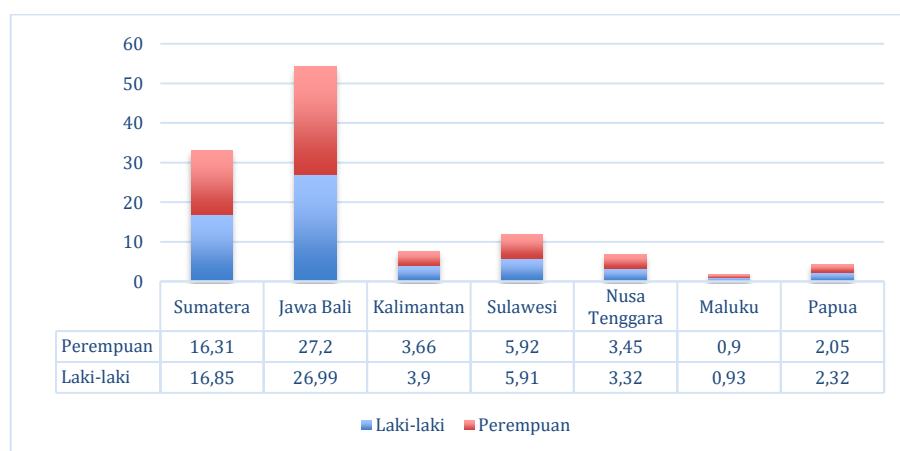
Sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 jumlah penduduk pedesaan mengalami *trend* meningkat dengan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 126,35 juta jiwa. Sedangkan mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 akhir terjadi penurunan jumlah penduduk desa seperti terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Total Penduduk Pedesaan Tahun 2010 - 2018 (dalam juta orang)

Sumber: Susenas BPS 2018, data diolah.

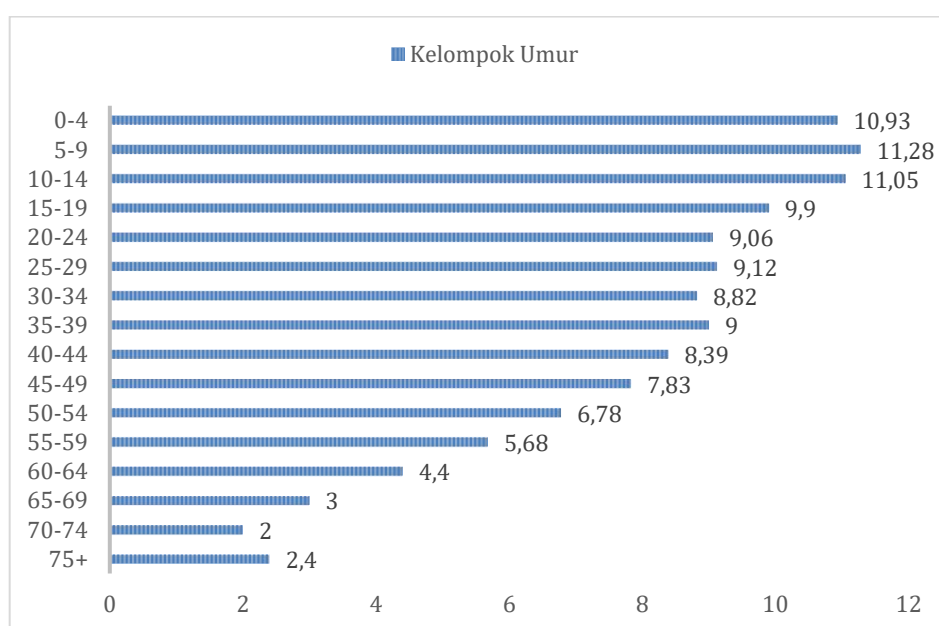
Pada tahun 2018, jumlah penduduk desa di Indonesia mencapai 119,7 juta jiwa, dimana komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 60,21 juta jiwa dan penduduk jenis kelamin perempuan sebesar 59,20 juta jiwa.



Gambar 4.2 Perbandingan Penduduk Desa Laki-laki dan Perempuan di Indonesia menurut Pulau Tahun 2018 (dalam juta orang)

Sumber: Susenas BPS 2018, data diolah.

Berdasarkan Gambar 4.2, konsentrasi penduduk desa terbesar berada di Pulau Jawa Bali sebanyak jumlah 54,19 juta jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 26.99 juta jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebesar 27.20 juta jiwa. Sebuah hal yang umum jika Jawa Bali menempati posisi teratas dalam hal jumlah penduduk karena Pulau Jawa khususnya merupakan terkonsentrasinya pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia sehingga tak heran jika Pulau Jawa dapat menarik orang masuk untuk berbagai macam kegiatan, sebagai contoh mengenyam pendidikan, mencari pekerjaan lapangan pekerjaan, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Sedangkan Pulau Maluku memiliki jumlah penduduk desa terkecil yaitu sebesar 1.83 juta jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 0.9 juta jiwa dan penduduk perempuan sebesar 0.93 juta jiwa.



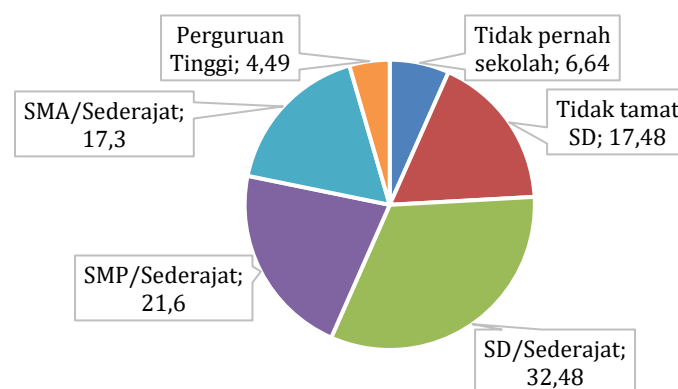
Gambar 4.3 Penduduk Desa menurut Kelompok Umur Tahun 2018 (dalam juta orang)

Sumber: Susenas BPS 2018, data diolah.

Selanjutnya komposisi penduduk pedesaan menurut kelompok umur memperlihatkan komposisi penduduk pedesaan di Indonesia didominasi oleh Penduduk Muda dengan kelompok umur 5-9 tahun seperti terlihat pada Gambar 4.3. Pada kategori umur produktif, mayoritas penduduk pedesaan merupakan kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 78,98 juta jiwa. Pada posisi kedua merupakan kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) yaitu sebesar 33,26 juta

jiwa, sedangkan kelompok umur tidak produktif (65 tahun keatas) sebesar 7,4 juta jiwa.

Pada sisi pendidikan, menurut data BPS, pendidikan pedesaan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pendidikan di perkotaan. Penduduk di pedesaan sebagian besar hanya tamatan SD/ sederajat yaitu sebesar 32,48 persen, sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA/ sederajat sebanyak 33,67 persen (Statistik Pendidikan BPS, 2018). Dibawah ini menunjukkan data pendidikan usia kerja penduduk desa pada tahun 2018.



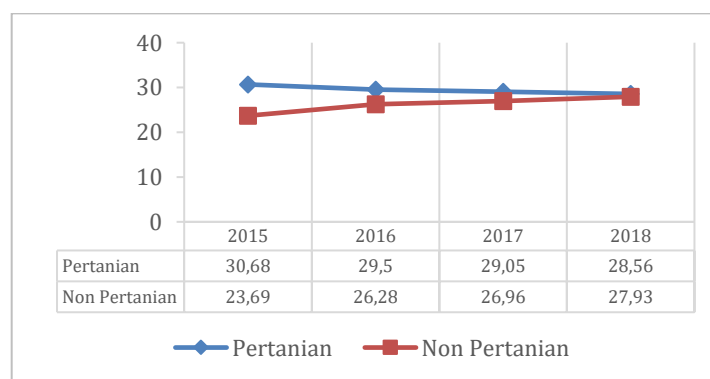
Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Pedesaan Usia 15 Tahun keatas Tahun 2018 (dalam persen)

Sumber: Publikasi Statistik Pendidikan BPS 2018.

Pada Gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa hanya mampu menamatkan pendidikan pada jenjang SD/ sederajat yaitu sebesar 32,48 persen. Adapun sebanyak 17,48 persen adalah penduduk desa yang tidak dapat menamatkan jenjang pendidikan SD/ sederajat dan sebanyak 6,64 persen adalah penduduk desa yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Kondisi ini mungkin sebagai akibat dari tingkat kesejahteraan penduduk desa yang kurang baik. Disamping itu belum meratanya pembangunan di Indonesia dimana pembangunan desa yang sudah lama tertinggal sehingga membuat sarana dan prasarana pendidikan di desa yang masih minim dan berdampak pada kurang baiknya sistem pendidikan di pedesaan.

Sebanyak 43.9 persen penduduk desa usia 15 tahun keatas memiliki ijazah sekolah menengah, yaitu 21.6 persen memiliki ijazah SMP/ sederajat dan sebanyak 17.3 persen penduduk memiliki ijazah SMA/ sederajat. Sementara persentase penduduk desa usia 15 tahun keatas yang memiliki ijazah perguruan tinggi hanya sebesar 4,49 persen. Artinya jumlah penduduk desa yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah. Data diatas menunjukkan masih relatif rendahnya pendidikan usia kerja di pedesaan, yang mungkin dapat memicu masih rendahnya pembangunan manusia di pedesaan. Sebagai salah satu tujuan dasar pembangunan maka pendidikan memainkan peran kunci dalam kemampuan negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas untuk pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan (Todaro, 2015). Dengan demikian, pendidikan dapat dilihat sebagai komponen vital dari pertumbuhan dan perkembangan - sebagai input untuk fungsi produksi dalam hal pembangunan ekonomi.

Pada sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk pedesaan secara umum memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya bergantung pada salah satu sumber mata pencaharian saja, namun melakukan beberapa kegiatan yang ada di sektor pertanian dan non pertanian.



Gambar 4.5 Tenaga Kerja Pertanian dan Non Pertanian Pedesaan Tahun 2015 - 2018 (dalam juta orang)

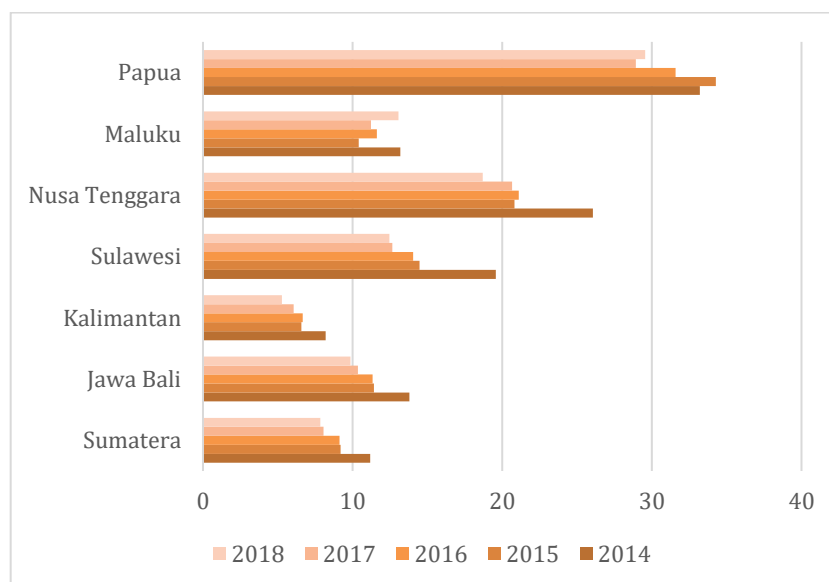
Sumber: Sakernas BPS, data diolah.

Dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2018, seperti yang terlihat pada Gambar 4.5 sektor pertanian masih menjadi primadona dalam hal penyerapan tenaga kerja di pedesaan. Pada tahun 2018 penduduk desa

usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 28,56 juta jiwa dan sebanyak 27,93 juta jiwa adalah penduduk desa usia 15 tahun keatas yang bekerja di sektor non pertanian.

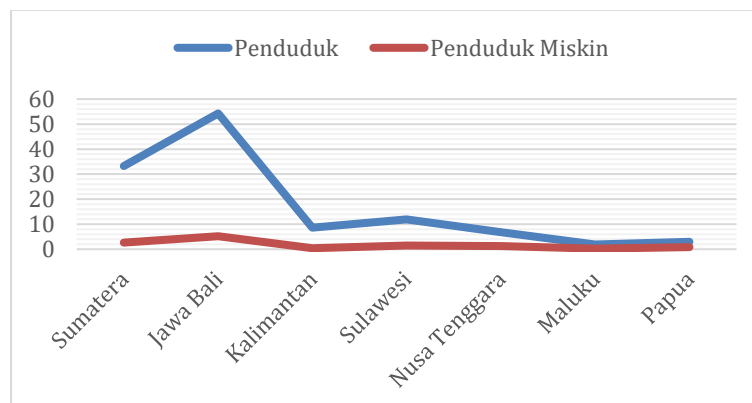
4.1.2 Tingkat Kemiskinan Desa

Kemiskinan masih banyak ditemui di hampir seluruh negara berkembang. Hal serupa juga dialami dan masih menjadi perhatian utama di Indonesia terutama dalam pembangunan negara. Penyebab terjadinya kemiskinan selain karena jumlah penduduk yang padat serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih terpusat di kota besar juga karena kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di tiap daerah. Di bawah ini merupakan perkembangan tingkat kemiskinan pedesaan menurut pulau tahun 2014 sampai dengan 2018.



Gambar 4.6 Persentase Kemiskinan Pedesaan di Indonesia menurut Pulau Tahun 2014-2018 (dalam persen)

Sumber: Susenas BPS, data diolah.



Gambar 4.7 Perbandingan Penduduk dan Penduduk Miskin Desa di Indonesia menurut Pulau Tahun 2018 (dalam juta orang)

Sumber: Susenas BPS 2018, data diolah.

Data pada Gambar 4.6 diatas menjelaskan berbagai tingkat kemiskinan pedesaan yang dibagi kedalam tujuh kepulauan di Indonesia dan Gambar 4.6 menggambarkan komposisi perbandingan penduduk desa dan penduduk miskin pada tahun 2018. Selama periode lima tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018, Pulau Papua selalu menduduki posisi teratas dalam hal kemiskinan. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin pedesaan di Pulau Papua mencapai angka tertinggi yakni sebesar 34,28% adalah penduduk yang memiliki pendapatan perkapita berada dibawah garis kemiskinan. Pulau Nusa Tenggara berada dalam posisi kedua dalam hal banyaknya penduduk miskin pedesaan dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 26,06% pada tahun 2014. Sedangkan Pulau Sulawesi hampir setiap tahun menempati posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 19,57%. Banyak hal ditenggarai sebagai penyebab belum maksimalnya program pengentasan kemiskinan di pulau-pulau yang terletak di wilayah timur Indonesia, seperti belum meratanya pembangunan dan kondisi geografis yang relatif susah. Infrastruktur menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah timur Indonesia.

Berbeda halnya, Kalimantan selalu menjadi pulau dengan jumlah penduduk miskin pedesaan terendah dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kalimantan berada pada titik terendahnya yaitu 5,28% seperti yang terlihat pada Gambar 4.7. Pada RPJMN 2015-2019, pemerintah Indonesia memiliki target tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar

7,00-8,00%. Dengan masih tingginya tingkat kemiskinan pedesaan, masih banyak hal yang harus dibenahi dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan kemiskinan sesuai target RPJMN. Program pengentasan kemiskinan harus lebih diprioritaskan kepada masyarakat pedesaan karena menurut UU 6/2014, desa ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.3 Statistik Keuangan Pemerintah Desa

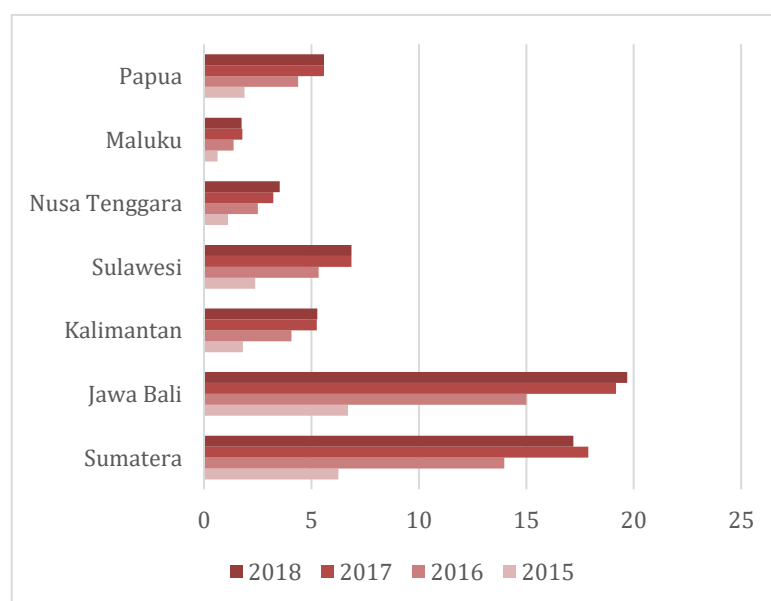
4.1.3.1 Dana Desa

Desa merupakan awal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang penting bagi negara. Sebagai upaya pemerintah dalam mengatur kemandirian desa, melalui UU 6/2014 tentang Desa membuat institusi ini (desa) memiliki kewenangan untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri karena telah menjadi daerah otonom. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat membantu pembangunan negara dalam mensejahterakan masyarakat secara khusus masyarakat desa. Mewujudkan kemandirian desa ditengah globalisasi merupakan sebuah tujuan pembangunan negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di pedesaan.

Sejalan dengan amanah UU 6/2014 tentang Desa, terutama pada pasal 72 ayat (2) menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis (IKK atau IKG), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pengalokasian Dana Desa yang ideal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menekan tingkat kemiskinan desa dimana secara fakta dari tahun 2010 sampai dengan 2018 diketahui bahwa tingkat

kemiskinan pedesaan lebih besar dari pada tingkat kemiskinan perkotaan. Peningkatan sarana/prasarana desa yang tercermin pada capaian output Dana Desa selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2018 yaitu terbangunnya sarana/prasarana desa seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, polindes, dan lain sebagainya, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut tentu saja menjadi harapan seluruh elemen masyarakat desa meskipun tetap ada yang beranggapan bahwa Dana Desa belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan yang maksimal.



**Gambar 4.8 Realisasi Dana Desa per Pulau Tahun 2015-2018
(dalam triliun rupiah)**

Sumber: DJPK Kemenkeu 2019, data diolah.

Total Dana Desa selama tahun 2015-2018 yaitu sebesar Rp187,7 triliun seperti terlihat pada Gambar 4.8 dengan alokasi tertinggi berada di pulau Jawa Bali yang mencapai Rp60,59 triliun (32% dari total alokasi) dan pulau Sumatera mencapai Rp55,31 triliun (30% dari total alokasi). Pada posisi ketiga terdapat pulau Sulawesi yang mencapai Rp21,44 triliun (11% dari total alokasi). Selanjutnya pulau Papua dengan realisasi sebesar Rp17,43 triliun (9% dari total alokasi). Sementara pulau Kalimantan mencapai Rp16,4 triliun (9%) dan pulau Nusa Tenggara mencapai Rp10,37 triliun (6%). Pulau Maluku memiliki anggaran Dana Desa terkecil dari yang lain dengan realisasi sebesar Rp5,54 triliun (3%). Dibawah ini

adalah 20 kabupaten/kota yang memperoleh Dana Desa tertinggi dan 20 kabupaten/kota yang memperoleh Dana Desa terendah pada tahun 2018.

Tabel 4.1 Dua Puluh Kabupaten/Kota Penerima Dana Desa Tertinggi dan Terendah Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)

No	Kab/Kota Tertinggi	Jml Desa	Dana Desa	No	Kab/Kota Terendah	Jml Desa	Dana Desa
1	Kab. Aceh Utara	852	562.23	1	Kota Prabumulih	12	16.29
2	Kab. Pidie	730	498.84	2	Kota Banjar	16	17.29
3	Kab. Bireuen	609	416.72	3	Kota Kotamobagu	15	17.43
4	Kab. Bogor	416	402.07	4	Kota Jayapura	14	18.47
5	Kab. Aceh Besar	604	394.17	5	Kota Sabang	18	19.53
6	Kab. Garut	421	393.54	6	Kota Batu	19	21.35
7	Kab. Cirebon	412	370.24	7	Kota Sawahlunto	27	23.47
8	Kab. Pati	401	365.45	8	Kota Denpasar	27	27.40
9	Kab. Tolikara	541	365.44	9	Kab. Sukamara	29	28.28
10	Kab. Yahukimo	510	357.95	10	Kab. Penajam Paser Utara	30	28.61
11	Kab. Kebumen	449	350.02	11	Kota Tual	27	28.66
12	Kab. Cianjur	354	346.45	12	Kota Ambon	30	30.78
13	Kab. Aceh Timur	513	345.12	13	Kab. Bintan	36	30.90
14	Kab. Brebes	292	344.20	14	Kota PadangSidimpunan	42	33.66
15	Kab. Magelang	367	325.36	15	Kab. Supiori	38	34.11
16	Kab. Purworejo	469	325.02	16	Kab. Tana Tidung	32	34.24
17	Kab. Tasikmalaya	351	322.59	17	Kab. Karimun	42	35.44
18	Kab. Probolinggo	325	322.10	18	Kab. Belitung Timur	39	35.62
19	Kab. Lamongan	462	321.35	19	Kab. Solok Selatan	39	35.72
20	Kab. Klaten	391	320.94	20	Kab. Pasaman Barat	19	35.84

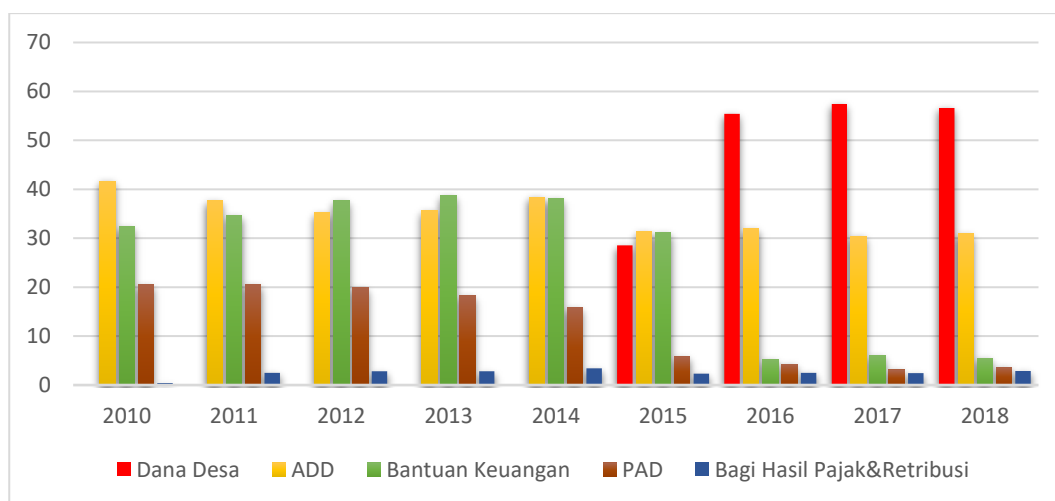
Sumber: DJPK Kemenkeu 2019.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah desa sangat mempengaruhi besaran Dana Desa yang mengalir ke kabupaten/kota. Variabel jumlah desa ini mengindikasikan apabila semakin banyak desa maka akan semakin banyak jumlah penduduk desa yang berada di kabupaten/kota tersebut, yang mana menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, jumlah penduduk desa sebagai salah satu indikator dalam penentuan porsi anggaran Dana Desa.

4.1.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah desa menjabarkan program/kegiatan

pembangunan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBDES merepresentasikan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan bagaimana upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui belanja desa.

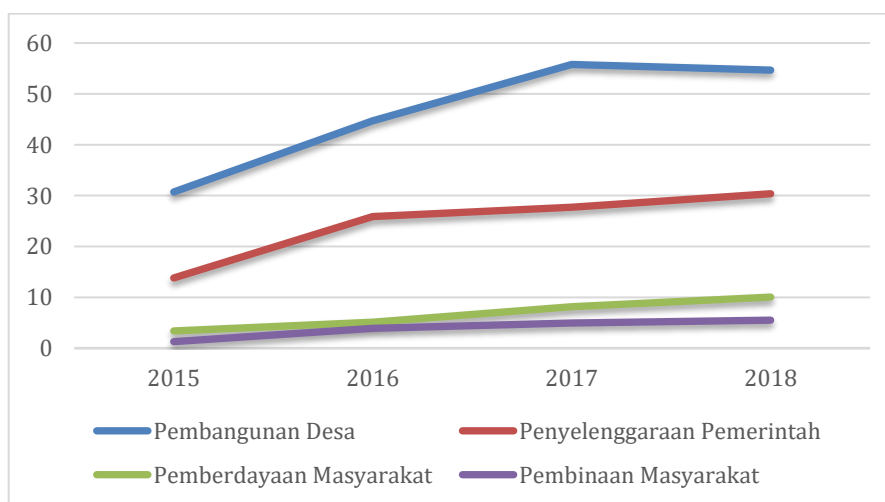


Gambar 4.9 Rasio Sumber Pendapatan Desa terhadap Pendapatan Desa Tahun 2010-2018 (dalam persen)

Sumber: Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa BPS.

Melihat Gambar 4.9 diatas, diketahui bahwa pemerintah desa memiliki beberapa sumber pendapatan desa menurut UU 6/2014. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014, komponen penyumbang pendapatan desa terbesar yaitu dari transfer pemerintah yang berupa Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan, sedangkan mulai tahun 2015 sampai dengan 2018 komponen penyumbang pendapatan desa terbesar adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa tertinggi berada pada angka 57,42 persen dari total pendapatan total pendapatan desa pada tahun 2017. Selanjutnya berturut-turut ada Alokasi Dana Desa, merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, tertinggi sebesar 41,69 persen dari total pendapatan desa pada tahun 2018 dan Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 38,67 persen dari total pendapatan desa. Komponen pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi pemerintah kabupaten/kota sebesar 2,89 persen dari

total pendapatan desa pada tahun 2018. Sedangkan kemandirian fiskal desa dapat dikatakan masih rendah, tercermin dari kecilnya realisasi PAD desa yang setiap selalu menurun dimana persentase PAD desa terhadap pendapatan desa terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,80 persen. Dengan besarnya anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan terlihat bahwa pemerintah desa masih sangat tergantung pada transfer baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.



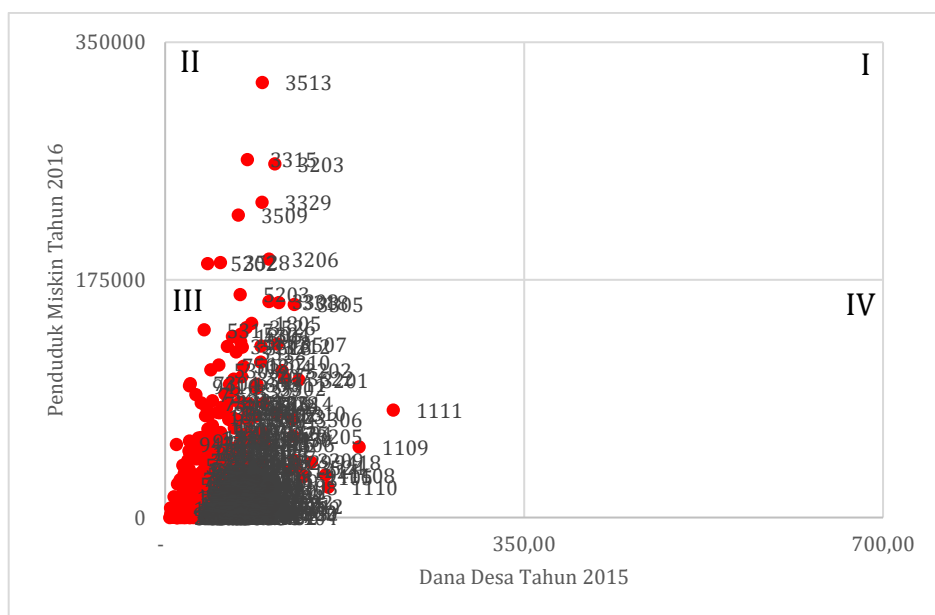
Gambar 4.10 Realisasi APBDES Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)

Sumber: Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa BPS.

Komposisi APBDES setelah pendapatan desa yaitu belanja desa. Belanja ini menunjukkan besarnya *government expenditure* yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk periode waktu tertentu. Melihat data pada Gambar 4.10 di atas terlihat bahwa pendapatan desa sebagian besar digunakan untuk bidang pembangunan desa yaitu sebesar Rp 187 triliun sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada posisi kedua, bidang penyelenggaraan pemerintah yang berupa pembayaran gaji dan operasional aparatur desa menghabiskan Rp 97,78 triliun. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat desa berturut-turut sebesar Rp 26,70 triliun dan Rp 15,65 triliun.

4.2 Keterkaitan Dana Desa dan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan (Analisis Deskriptif)

Keterkaitan kebijakan Dana Desa dalam program pengentasan kemiskinan pedesaan di Indonesia dapat dilihat melalui pemetaan Dana Desa yang diberikan kepada tiap kabupaten/kota pada periode t-1 dan jumlah penduduk miskin pedesaan pada periode t dengan menggunakan analisis diagram kartesius empat kuadran. Hasil pengamatan menunjukkan perubahan kabupaten/kota pada periode 2015 sampai dengan 2018.



Gambar 4.11 Pemetaan Dana Desa Tahun 2015 dan Tingkat Kemiskinan Pedesaan Tahun 2016

Sumber: DJPK Kemenkeu dan Susenas BPS, data diolah.

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa posisi kabupaten/kota yang berada pada kuadran II memiliki jumlah penduduk miskin pedesaan yang tinggi pada tahun 2016 dengan pemberian Dana Desa yang rendah pada tahun 2015. Kabupaten/kota yang berada pada kuadran II pada adalah Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Grobongan, Kab. Brebes, Kab. Jember, Kab. Probolinggo dan keseluruhan kabupaten/kota sisanya berada pada kuadran III dimana memiliki jumlah penduduk miskin pedesaan yang rendah dengan pemberian Dana Desa yang rendah.

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa posisi kabupaten/kota yang berada pada kuadran II memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi pada tahun 2017 dengan

4.3 Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan (Hasil Estimasi)

Spesifikasi model empiris 1 diatas diestimasi dengan menggunakan data Susenas, Sakernas, dan Kementerian Keuangan dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Jumlah observasi yang digunakan untuk estimasi sebanyak 3649 observasi.

Tabel 4.2 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian Level Kabupaten/Kota

Variabel	Obs	Mean	Sd	Min	Max	Sat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan <i>POV</i>	3649	40582,38	56640.10	0.00	551591.00	orang
Dana Desa <i>DD</i>	3649	50.79	77.75	0.00	635.31	miliar
Alokasi Dana Desa <i>ADD</i>	3649	38.33	43.50	0.00	563.89	miliar
Rasio PAD <i>rasio_PAD</i>	3649	6.54	11.60	0.00	100.00	persen
Bantuan Keuangan <i>BK</i>	3649	19.13	30.65	0.00	309.47	miliar
APBD Kab/Kota <i>APBD</i>	3649	1190.71	748.81	0.00	7300.48	miliar
Rasio Belanja Modal terhadap Pengeluaran Daerah Kab/Kota <i>rasio_BM</i>	3649	23.18	8.35	0.00	70.48	persen
PDRB Kab/Kota <i>PDRB</i>	3649	13485.48	21066.96	94.10	242023.30	miliar
Laju Pertumbuhan Penduduk Desa <i>growth_popdes</i>	3649	-0.03	8.29	-88,41	102.02	persen
Penduduk Desa <i>popdes</i>	3649	269382.00	268734.00	239.00	1472452.00	orang
Rasio Tenaga Kerja sektor pertanian terhadap non pertanian <i>rasio_labor</i>	3649	334.83	2571.92	0.00	94657.14	persen
Rasio Penduduk Usia Lanjut terhadap <i>rasio_old</i>	3649	7.49	3.14	0.00	20.73	persen

jumlah penduduk							
Tingkat Pendidikan	<i>educ</i>	3649	30114.00	27386.00	67.00	167484.00	orang
Beras Masyarakat Miskin	<i>raskin</i>	3649	142471.00	206481.00	0.00	1217221.00	orang

Dapat terlihat pada Tabel 4.2 diatas variabel dependen *POV* yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia memiliki observasi sejumlah 3649 dengan rata-rata jumlah penduduk miskin pedesaan yaitu sebesar 40582 orang. Nilai maksimum dari variabel ini adalah 551591 orang yaitu di Kab. Ciganjur Jawa Barat.

Variabel independen keuangan DD yang menunjukkan kebijakan Dana Desa memiliki observasi sejumlah 3649 dengan rata-rata realisasi Dana Desa pada seluruh kabupaten/kota sebesar Rp 50,79 miliar. Nilai minimum dari variabel ini adalah nol, sedangkan nilai maksimum dari variabel ini yaitu sebesar Rp 635 miliar di Kab. Aceh Utara. Disisi lain, variabel ADD menunjukkan Alokasi Dana Desa dimana proses penganggarnya secara resmi dimulai sejak tahun 2005 berdasarkan PP 70/2005. Nilai minimum dari variabel ini yaitu nol dan nilai maksimum dari Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 563 miliar di Kab. Kutai Kartanegara. Rasio PAD terhadap pendapatan desa tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan, Kab. Lombok Timur, Kab. Magetan, Kab. Bener Meriah, Kab. Bintan, dan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan. Sedangkan Bantuan Keuangan tertinggi berada di Kab. Bogor. Variabel APBD Kabupaten/Kota memiliki nilai maksimum yaitu Rp 7 triliun yang berada di Kab. Bogor, sedangkan rasio belanja modal terhadap pengeluaran daerah kabupaten/kota tertinggi yaitu sebesar 70,47% yaitu di Kota Bitung Sulawesi Utara.

Variabel makro yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten/Kota dimana PDRB terendah sebesar Rp 94,1 miliar di Kab. Tambrauw Papua Barat dan tertinggi sebesar Rp 242 triliun terdapat di Kab. Bekasi.

Variabel kependudukan laju pertumbuhan penduduk desa terendah terdapat di Kota Metro Lampung yaitu -88 persen dan tertinggi di Kab. Tambrauw Papua Barat yaitu sebesar 102 persen. Lalu variabel penduduk desa terendah terdapat pada Kota Metro Lampung dengan 239 orang dan tertinggi di Kab. Cianjur yaitu

1472452 orang. Variabel rasio tenaga kerja sektor pertanian terhadap non pertanian tertinggi terdapat di Kab. Ndunga Papua. Selanjutnya rasio penduduk usia lanjut terhadap total penduduk desa tertinggi ada di Kab. Wonogiri dengan 20,72 persen. Untuk variabel tingkat pendidikan, Kota Metro Lampung memiliki memiliki jumlah penduduk yang telah mengikuti program wajib belajar 12 tahun terkecil yaitu sebanyak 67 orang dan terbanyak dengan total 167484 orang adalah Kab. Lamongan. Untuk variabel raskin, Kab. Cianjur mempunyai jumlah penduduk yang pernah mendapat atau membeli raskin tertinggi dengan total penduduk 1,2 juta jiwa.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan

	Model (1)	Model (2)	Model (3)	Model (4)	Model (5)
	OLS miskin	FE miskin	FE miskin	FE miskin	FE miskin
L1.DD	6.202 (14.155)	-176.821*** (10.403)	-114.758*** (11.543)	-53.111*** (12.451)	-60.351*** (12.285)
L1.ADD			-114.459*** (19.672)	-45.448** (20.110)	-55.564*** (20.439)
L1.PAD			149.810** (59.307)	57.464 (60.586)	-63.724 (60.661)
L1.BK			-232.470*** (22.774)	-173.161*** (22.834)	-125.739*** (23.060)
L1.APBD Kab/kota			-12.913*** (1.842)	-10.300*** (2.046)	-4.427** (2.056)
L1.rasio_BM			-100.269 (69.007)	-51.180 (69.930)	-1.942 (70.853)
PDRB Kab/Kota				-0.192 (0.165)	0.126 (0.163)
growth_popdes				54.502 (49.989)	33.259 (48.612)
popdes				0.098*** (0.024)	0.100*** (0.023)
rasio_labor sektor				0.327* (0.197)	0.430** (0.192)
rasio_old				-3087.478***	326.287

				(784.864)	(836.922)
educ				-0.862*** (0.078)	-0.715*** (0.076)
raskin				0.043*** (0.006)	0.050*** (0.007)
_cons	39760.892*** (1040.302)	60243.536* (1061.272)	71501.880* (1922.527)	80271.853** (8381.056)	34368.873* (9551.156)
<i>N</i>	3725	3725	3725	3649	3649
<i>r</i> ²	0.000	0.304	0.370	0.421	0.477
<i>r</i> ² _a	-0.000	0.200	0.275	0.330	0.387
<i>F</i>	0.192	177.092	146.054	114.615	45.732
<i>p</i>	0.661	0.000	0.000	0.000	0.000
tahun_fe	no	yes	yes	yes	yes
pulau_tahun	no	no	no	no	yes

Standard errors in parentheses

* $p < .1$, ** $p < .05$, *** $p < .01$

Model (1) pada Tabel 4.3 menampilkan hasil regresi hanya untuk variabel utama penelitian dengan menggunakan model estimasi OLS. Hasilnya menunjukkan lag pertama kebijakan Dana Desa tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan. Pada Model 1 belum memperlihatkan kausalitas Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan namun hanya memperlihatkan korelasi (hubungan) antara kedua variabel dependen dan variabel independen utama.

Model (2) pada Tabel 4.3 menampilkan hasil regresi dengan *fixed effect* hanya untuk variabel utama penelitian yaitu Dana Desa dan jumlah penduduk miskin pedesaan dan telah ditambahkan *dummy* tahun untuk mengontrol *time trend* pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa lag pertama kebijakan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Koefisien α_1 (Dana Desa) sebesar (-176.821) ini dapat bias karena belum menangkap variabel kontrol lain yang mungkin juga memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan.

Model (3) pada Tabel 4.3 menampilkan hasil regresi yang telah menambahkan variabel kontrol keuangan pada model empiris untuk mengetahui efek yang sebenarnya dari variabel utama penelitian. Variabel kontrol keuangan

yang ditambahkan kedalam model adalah Alokasi Dana Desa, Rasio PAD terhadap pendapatan desa, Bantuan Keuangan, APBD Kabupaten/Kota (sisi penerimaan), dan rasio Belanja Modal terhadap Belanja Kabupaten/Kota. Hasil menunjukkan bahwa koefisien α_1 (Dana Desa) menunjukkan penurunan setelah beberapa variabel kontrol dimasukkan ke dalam model. Pada Model 3 menunjukkan lag pertama kebijakan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan dengan koefisien yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Model 2.

Model (4) pada Tabel 4.3 menampilkan hasil regresi yang telah menambahkan beberapa variabel kontrol selain variabel keuangan yang telah ditambahkan sebelumnya seperti PDRB Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan penduduk desa, penduduk desa, rasio tenaga kerja sektor pertanian terhadap non pertanian, rasio penduduk usia lanjut terhadap total penduduk desa, dan program anti kemiskinan lain dari pemerintah pusat yaitu program beras masyarakat miskin (raskin). Hasil menunjukkan bahwa koefisien α_1 (Dana Desa) menunjukkan penurunan setelah beberapa variabel kontrol dimasukkan kedalam model empiris. Pada Model 4 menunjukkan lag pertama kebijakan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan dengan koefisien yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Model 3.

Untuk melihat konsistensi hasil estimasi, selanjutnya akan ditambahkan *dummy* pulau_tahun untuk mengontrol karakteristik wilayah antar pulau yang diinteraksikan dengan *time trend*. Pada Model 5 *dummy* pulau dibagi kedalam tujuh besar kelompok kepulauan yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Adanya penambahan kontrol efek tetap spesifik wilayah yang diinteraksikan dengan *time trend* akan meningkatkan koefisien pada variabel *interest* yang lebih baik dari Model 4. Pada Model 5 ini lag pertama kebijakan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan.

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan model estimasi *fixed effect*, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Pengujian Restriksi Persamaan Linier

dengan Pendekatan Uji F dilakukan yang untuk membandingkan dua model antara model 4 dan model 5, hasilnya menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat signifikan 5% (Lampiran 3) sehingga model terbaik dalam penelitian ini adalah Model 5. Model ini telah memasukkan *dummy* pulau_tahun yang mengontrol karakteristik kabupaten/kota antar pulau antar tahun. Disisi lain nilai $adj R^2$ Model 5 yang lebih besar bila dibandingkan dengan model lainnya dimana menurut Gujarati (2016) nilai $adj R^2$ adalah ukuran yang lebih baik dalam hal perbandingan model daripada R^2 karena $adj R^2$ memberikan hukuman untuk penambahan lebih banyak variabel.

Pada penelitian ini telah dilakukan *robustness check* dengan mengganti variabel dependen menjadi persentase penduduk miskin pedesaan. Hasil estimasi menunjukkan adanya konsistensi pada tanda variabel interest Dana Desa yang selalu negatif (Lampiran 4). Hal ini menunjukkan bahwa model yang dipakai dalam penelitian telah *robust*.

▪ **Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Berdasarkan hasil estimasi pada model Model 5 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa lag pertama kebijakan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan dimana peningkatan anggaran Dana Desa sebesar Rp 1 miliar pada periode t-1 akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan periode t sebesar 60 orang. Pengaruh negatif kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan pedesaan sejalan dengan penelitian Higgins (2012) yang berpendapat kebijakan transfer pemerintah cenderung memiliki dampak yang tinggi pada daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Sejalan dengan teori transfer antar level pemerintah yang dikemukakan oleh Rosen dan Gayer (2010) dimana kebijakan Dana Desa masuk dalam kategori *conditional non-matching grants* dikarenakan penggunaan Dana Desa telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya tujuan spesifik penggunaan Dana Desa akan meningkatkan layanan dasar yang dapat diakses oleh masyarakat desa terutama masyarakat miskin desa dan berdampak pada peningkatan kepuasan individu sesuai

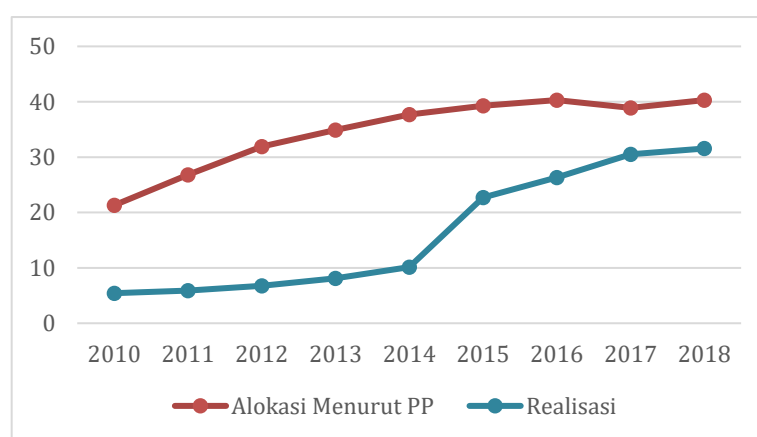
teori kesejahteraan sosial oleh Rosen dan Gayer (2010) yang mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan sosial merupakan sebuah fungsi yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang bagaimana kepuasan individu memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut hasil estimasi, kebijakan Dana Desa terlihat berhubungan negatif dan signifikan pada level 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan, namun terdapat hasil yang kurang memuaskan dimana peningkatan lag pertama Dana Desa sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 60 orang. Hasil ini tidak lebih efektif bila dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya yang berupa Bantuan Keuangan dimana peningkatan Bantuan Keuangan sebesar Rp 1 miliar mampu menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 125 orang. Adanya ketidakefektifan dalam hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2015) yang menganggap terdapat kesalahan dalam formula penyusun Dana Desa, dimana besaran Dana Desa aktual yang didistribusikan oleh pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota sebagian besar didominasi oleh Alokasi Dasar sebesar 90% dan hanya memberikan sedikit porsi pada Alokasi Formula (10%) yang memperhatikan heterogenitas daerah seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

▪ **Pengaruh Sumber Pendapatan Desa Lainnya terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Sumber pendapatan desa lainnya seperti Bantuan Keuangan memiliki pengaruh terbesar dalam penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan. Setiap peningkatan Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 1 miliar pada periode $t-1$ akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 125 orang pada periode t . Menurut Stiglitz (2015) pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat dan memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan layanan secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait pelayanan publik akan lebih baik jika diserahkan dan dilakukan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah/pemerintah daerah (Sirait, 2010).

Disisi lain, variabel Alokasi Dana Desa juga berbuhungan negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Setiap peningkatan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar pada periode t-1 akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 55 orang pada periode t. Koefisien pada variabel Alokasi Dana Desa lebih sedikit bila dibandingkan dengan Dana Desa diduga karena besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan pada periode 2010 sampai dengan 2018 lebih rendah dari yang seharusnya seperti yang terlihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2010 – 2018 (dalam triliun)

Sumber: Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa BPS

Menurut PP 70/2005, Alokasi Dana Desa seharusnya dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa. Rendahnya anggaran ADD yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota ke desa bila dibandingkan dengan besaran yang diatur menurut peraturan menjadikan anggaran yang masuk ke pemerintah desa kurang begitu efektif dalam proses pengentasan kemiskinan. Selain itu, menurut peraturan sebesar 30% dari anggaran ADD digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembayaran gaji para perangkat desa sehingga anggaran tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan desa.

Sedangkan variabel rasio PAD terhadap pendapatan desa yang menggambarkan kemandirian fiskal desa tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal desa belum berperan dalam program pengentasan kemiskinan.

- **Pengaruh APBD dan Rasio Belanja Modal Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Berdasarkan hasil estimasi pada Model 5 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa APBD Kabupaten/Kota berhubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Setiap peningkatan peningkatkan lag pertama APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp 1 miliar akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 4 orang. Sedangkan variabel rasio Belanja Modal terhadap total pengeluaran APBD Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Berdasarkan hasil estimasi yang menunjukkan bahwa belanja modal kabupaten/kota tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan karena anggaran belanja modal kabupaten/kota yang cenderung stagnan. Menurut data dari Kementerian Keuangan, rasio belanja modal terhadap pengeluaran APBD dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 belum menunjukkan perbaikan. Penggunaan belanja APBD terhadap penyediaan infrastruktur di daerah dicerminkan melalui belanja modal, dalam kurun 4 tahun rasio belanja modal masih berkisar diangka 23,2% pada tahun 2012, dan menjadi sebesar 23,9% pada tahun 2016. Pada tahun 2014 rasio belanja modal terhadap belanja APBD merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 26,1%, namun sayangnya pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu masing-masing menjadi 24,7% dan sebesar 23,9% (Kemenkeu, 2016).

- **Pengaruh PDRB Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Berdasarkan hasil estimasi pada Model 5 Tabel 4.3 menunjukkan hasil PDRB Kabupaten/Kota tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Jiandong et a. (2016) yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan GDP perkapita tidak dapat menyelesaikan kemiskinan pedesaan. Menurut penelitian ini terdapat pandangan yang salah bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menghapus kemiskinan. Selain itu, penelitian ini menganggap ada banyak alasan akibat munculnya fenomena ini. Pertama, meningkatkan garis kemiskinan menyebabkan peningkatan rasio hitungan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, adanya pertumbuhan ekonomi

akan membuat garis kemiskinan cenderung naik yang berakibat pada peningkatan penduduk miskin. Kedua, perlu waktu untuk beralih dari PDB per kapita ke pendapatan per kapita, dan kemudian, ke konsumsi per kapita. Lebih lanjut, penelitian ini memastikan bahwa keluarga miskin yang bekerja sebagai petani mendapat untung lebih sedikit daripada keluarga kaya pada masa pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hal ini melemahkan pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan yang mana banyak orang berprofesi sebagai petani. Ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mengalir ke populasi miskin. Adanya lingkungan alam yang sulit, populasi, dan adat istiadat budaya akan menghambat efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi mencapai keluarga miskin.

▪ **Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Desa dan Penduduk Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Berdasarkan hasil estimasi pada Model 5 pada Tabel 4.3 variabel kontrol penduduk desa memiliki berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Setiap peningkatan penduduk desa sebesar 1 orang akan meningkatkan jumlah penduduk miskin desa sebesar 0,1 orang. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk desa tidak berpengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan dimana selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2018 jumlah penduduk desa mengalami penurunan. Ada beberapa hal yang menjadikan jumlah penduduk menjadi penghambat pembangunan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Menurut Todaro (2015) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tidak akan menaikkan pendapatan. Selain itu semakin tinggi jumlah penduduk, lapangan pekerjaan juga menjadi berkurang sehingga banyak orang sulit memperoleh pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin.

- **Pengaruh Tenaga Kerja sektor Pertanian terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Berdasarkan hasil estimasi pada Model 5 pada Tabel 4.3 variabel kontrol rasio tenaga kerja sektor pertanian berhubungan positif dengan jumlah penduduk miskin pedesaan. Sebagian besar pekerjaan penduduk desa adalah sebagai petani namun disisi lain pada akhir-akhir ini kinerja sektor pertanian sedang lesu yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun yang mengakibatkan akan meningkatnya tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS bahwa tingkat pengangguran terbuka di pedesaan meningkat dari 3,72 persen di awal 2018 menjadi 4,04 diakhir 2018 (Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia BPS, 2018).

- **Pengaruh Rasio Penduduk Usia Lajut dan Tingkat Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Berdasarkan hasil estimasi pada Model 5 pada Tabel 4.3 variabel kontrol penduduk desa yang telah mengikuti program wajib belajar 12 tahun memiliki pengaruh yang signifikan pada jumlah penduduk miskin pedesaan, sedangkan rasio penduduk usia lanjut tidak berpengaruh. Penduduk usia lanjut biasanya memiliki produktifitas dalam bekerja yang rendah sehingga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Sedangkan peningkatan penduduk desa yang telah mengikuti program wajib belajar 12 tahun sebesar 1 orang akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 1 orang. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Aref (2012) dimana terdapat kontribusi pendidikan dalam pengurangan kemiskinan. Menurut penelitian ini pendidikan akan mempengaruhi keahlian dan produktivitas tenaga kerja. Adanya *skill* individu yang lebih baik akan berdampak pada lebih tingginya pendapatan yang diperoleh sehingga akan berpengaruh pada kehidupan sosial individu tersebut.

- **Pengaruh Program Anti Kemiskinan Raskin terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.**

Berdasarkan hasil estimasi pada Model 5 pada Tabel 4.3 variabel kontrol program beras masyarakat miskin berhubungan positif dengan jumlah penduduk miskin pedesaan sehingga program raskin belum berpengaruh pada proses pengentasan kemiskinan. Hal ini diduga karena tumpang tindihnya Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas Program Raskin sehingga terjadi ketidak efisienan dalam penyaluran beras. Pada tahun 2015, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) pada 2014. Program subsidi raskin ini dikelola tim koordinasi yang merupakan gabungan dari beberapa instansi yang terdiri atas unsur pusat dan daerah seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dari hasil pemeriksaan kinerja, BPK menilai kinerja tim koordinasi masih tumpang tindih sehingga terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dan uraian tugas dalam pengelolaan program. Selain itu, data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) yang ditetapkan TNP2K juga belum sesuai dengan kondisi riil penerima raskin. Terdapat 50 kabupaten atau kota yang tidak melakukan pemutakhiran data rumah tangga miskin.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan pedesaan dimana Kebijakan Dana Desa ini adalah mandat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.

Berdasarkan hasil estimasi pada model empiris, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa dalam kurun waktu 2015-2018 berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Adanya hubungan negatif antara kebijakan Dana Desa dan jumlah penduduk miskin pedesaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Higgins (2012) yang menyatakan kebijakan transfer pemerintah cenderung untuk memiliki dampak yang lebih tinggi di daerah pedesaan.

Walaupun secara hasil estimasi pada model empiris, kebijakan Dana Desa terbukti berhubungan negatif dan signifikan pada level 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan, terdapat hasil yang kurang memuaskan dimana peningkatan lag pertama Dana Desa sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 60 orang. Hasil ini tidak lebih efektif bila dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya yang berupa Bantuan Keuangan. Menurut hasil estimasi, Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pengaruh terbesar dalam penurunan jumlah penduduk miskin dimana peningkatan lag pertama Bantuan Keuangan sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 125 orang. Adanya ketidakefektifan dalam hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2015) yang menganggap terdapat kesalahan dalam formula penyusun Dana Desa, dimana besaran Dana Desa aktual yang didistribusikan oleh pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah

kabupaten/kota sebagian besar didominasi oleh Alokasi Dasar yang merupakan porsi sama rata untuk setiap kabupaten/kota sebesar 90% dan hanya memberikan sedikit porsi pada Alokasi Formula (10%) yang memperhatikan heterogenitas daerah seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

5.2 Saran

Penelitian ini menggunakan rentang periode penelitian dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dimana Kebijakan Dana Desa secara resmi baru berjalan pada tahun 2015. Penggunaan lag pertama pada penelitian ini mengakibatkan dalam proses pengolahan data, variabel interest Dana Desa yang digunakan hanya sampai tahun 2017 sehingga penelitian ini belum mengakomodir formula perubahan Dana Desa mulai tahun 2018.

Berdasarkan hasil estimasi pada model empiris, Kebijakan Dana Desa terlihat belum efektif dalam proses pengentasan kemiskinan dikarenakan mayoritas formula penyusun Dana Desa berasal dari Alokasi Dasar yaitu sebesar 90%. Disisi lain, nilai koefisien pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 60.351 diduga belum sepenuhnya berasal dari kebijakan Dana Desa. Masih terdapat beberapa program pengentasan kemiskinan berbasis desa lainnya yang belum ditangkap oleh model walaupun dalam penelitian ini sudah memasukkan program beras masyarakat miskin (raskin) sebagai kontrol sehingga hal ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, keterbatasan lainnya adalah penelitian ini hanya melihat pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan tanpa memperhatikan infrastruktur pedesaan dimana menurut peraturan, tujuan Dana Desa yaitu untuk mencapai pembangunan Desa dalam hal penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan data infrastruktur layanan dasar yang dibangun dengan memakai anggaran Dana Desa untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan pedesaan sehingga akan lebih sesuai dengan tujuan Dana Desa dalam peraturan.

Hasil penelitian ini berimplikasi adanya rekomendasi terhadap pemerintah, yaitu (1) formula penyusun Dana Desa agar memberikan porsi yang lebih besar pada Alokasi Formula yang memperhatikan heterogenitas setiap wilayah dimana karakteristik setiap daerah berbeda antara satu dengan yang lain; (2) terkait sumber pendapatan desa yang berupa Bantuan Keuangan, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saling berkoordinasi terkait penganggarannya mengingat hasil empiris menunjukkan Bantuan Keuangan memiliki pengaruh terbesar dalam proses pengentasan kemiskinan pedesaan. Rekomendasi ini berdasarkan pada data menurunnya besaran Bantuan Keuangan ke desa sejak tahun 2015 dimana Dana Desa mulai dianggarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adefeso, Hammed A. (2017). *Fiscal Federalism And Multidimensional Poverty Reduction In Nigeria: A Cross-State Analysis*. International Journal of Politics and Good Governance Volume VIII, No. 8.3 Quarter III 2017. ISSN: 0976 – 1195.
- Agegnehu, A., & Dibu, W. (2017). *Does decentralization have a role in poverty reduction? The Ethiopian experience*. Journal of African Studies and Development Vol. 9(1), pp. 1-6, February, 2017.
- Agostini, C. A., Brown, P.H., & Go' Ngora, D. P. (2010). *Public Finance, Governance, and Cash Transfers in Alleviating Poverty and Inequality in Chile*. Public Financial Publications.
- Ahluwalia, M. S. (2007). *Rural Poverty And Agricultural Performance In India*. The Journal of Development Studies, 14:3, 298-323.
- Anam, Choirul. (2017). *Analisis Dampak Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Bangkalan*. University of Indonesia.
- Aref, Abrisham. (2011). *Perceived Impact of Education on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran*. Life Science Journal 8(2): 498-501.
- Azfar, O., & Livingston, J. 2002. *Federalist disciplines or local capture: An empirical analysis of decentralization in Uganda*. mimeo IRIS: University of Maryland, College park.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Potensi Desa*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Pendidikan 2018*. Jakarta : BPS.
- Balisacan, A. M., & Pernia, E. M. (2002). *Probing Beneath Cross-National Averages: Poverty, Inequality, And Growth In The Philippines*. Asian Development Bank. ERD Working Paper No. 7
- Bergvall, D., Charbit, C., Kraan, D-J., & Merk, O. (2006). *Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending*. OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 3. Paris: OECD Publishing.

- Bird, R., & Rodriguez, E. R. (1999). *Decentralization and poverty alleviation: International experience and the case of the Philippines*. *Journal of Public Administration and Development*, 19, 299-319.
- Datt, G., & Ravallion, M. (1998). *Farm productivity and rural poverty in India*. *The Journal of Development Studies*, 34:4, 62-85.
- De Mello, L., & Barenstein, M. (2001). *Fiscal Decentralization and Governance: A Cross-Country Analysis*. IMF Working Paper
- Ekayuliana, B., Santoso, B., & Hidayati, S. A. (2018). *Village Fund Allocation and Village Fund to Reduce Poverty Rate Using Good Village Governance as Moderation in East Lombok Regency*. *International Journal of Science and Research (IJSR)* ISSN: 2319-7064
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). *Government Spending, Growth and Poverty in Rural India*. American Agricultural Economics Association. (November 2000): 1038–1051.
- Faridi, M. Z., & Nazar, R. (2013). *Impact of fiscal autonomy on poverty in Pakistan*. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS)*, ISSN 2309-8619.
- Fuad, Noor. (2004). *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta. LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Gujarati, Damodar. (2016). *Dasar-dasar Ekonometrika terjemahan*. Jakarta:Erlangga.
- Higgins, Sean. (2012). *The Impact of Bolsa Familia on Poverty: Does Brazil's Conditional Cash Transfer Program Have a Rural Bias?*. *The Journal of Politics and Society*. Helvidius Group of Columbia University.
- Hermawan, A., Istiqomah, Ahmad, A.A. (2019). *The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island*. *International Conference on Rural Development and Entrepreneurship 2019: Enhancing Small* Vol. 5 No.1 ISBN: 978-623-7144-28-1
- Hernandez, F., & Trillo. (2016). *Poverty Allevation in Federal Systems: The Case of Mexico*. World Development 2016.

- Jiandong, C., Wang, Y., Wen, J., Fang, F., & Song, M. (2016). *The Influences of Aging Population And Economic Growth On Chinese Rural Poverty*. *Journal of Rural Studies* 47 (2016) 665-676.
- Jutting, J., Kauffmann, C., Donnell, I. M., Osterrieder, H., Pinaud, N., & Wegner, L. (2004). *Decentralisation And Poverty In Developing Countries: Exploring The Impact*. OECD Development Centre Working Paper No. 236.
- Kementerian Keuangan. (2016). Ringkasan APBD 2016. Jakarta: Kemenkeu
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kurniasih, Dewi. (2013). *Penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Agregasi*, 1(1), 1-14.
- Lewis, Blane D. (2015). *Decentralising To Villages In Indonesia: Money (And Other) Mistakes*. *Public Administration and Development Journal*.
- Macours, K., & Swinnen, J.F.M. (2005). *Agricultural Labor Adjustments in Transition Countries: The Role of Migration and Impact on Poverty*. *Review of Agricultural Economics—Volume 27, Number 3—Pages 405–411*.
- Moche, T. J., Monkam, N., & Aye, G. C. (2014). *Fiscal decentralization and poverty in South Africa: evidence from panel data analysis*. *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 11, Issue 2, 2014.
- Nafziger, E.Wayne. 2006. *Economic Development, 4th edition*. Cambridge University Press.
- Okidegbe, N. 2001. *Rural Poverty Trends and Measurement*. The World Bank Rural Development Family.
- Otsuka, K., & Yamano, Y. (2006). *The Role of Rural Labor Markets in Poverty Reduction: Evidence from Asia and East Africa*. Foundation for Advanced Studies on International Development, Japan.
- Padda, I., and Hameed, A. (2018). *Estimating Multidimensional Poverty Levels In Rural Pakistan: A Contribution to Sustainable Development Policies*. *Journal of Cleaner Production* 197 (2018) 435-442.

- Pandey, L., and Reddy, A. A. (2012). *Farm Productivity and Rural Poverty in Uttar Pradesh: A Regional Perspective*. Agricultural Economics Research Review Vol. 25(No.1) January-June 2012 pp 25-35.
- Rahma, D. D., Somaji, R.P., & Kustono, A.S. (2019). *Government Expenditure, Poverty And Income Inequality In Indonesia: New Evidence From Village Funds*. International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 08, August 2019
- Rosen, H. S., and Gayer, T. (2010). *Public Finance, 8th edition*. McGraw-Hill International Editions.
- Schneider, A. (2003). *Decentralization: Conceptualization and measurement*. Studies in Comparative International Development, 38(3).
- Seabrook, Jeremy. (2006). *Kemiskinan Global*. Yogyakarta : CV. Langit Aksara.
- Sirait, Robby Alexander. (2010). *Pengaruh pengeluaran publik Pemda di Provinsi Jawa Barat terhadap angka kematian bayi; analisis data panel*. Tesis, Universitas Indonesia, Depok.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of The Public Sector Fourth Edition*. W. W. Norton Company, Inc.
- Surhayadi, Asep., Suryadarma, D., & Sumarmo, S. (2009). *The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia*. Journal of Development Economics 89 (2009) 109–117.
- Todaro, M. P., and Smith, S.C. (2015). *Economic Development, 11th edition*. George Washington University.
- UNDP. (2000). *Overcoming human poverty*. UNDP poverty report 2000. New York: UNDP.
- Valaris, Nicholas. (2012). *Fiscal Decentralization and Its Effect on Poverty Evidence from Panel Data on the lower 48 American States*. 2012). Capstone Projects-Economics. 2.
- Von Braun, J., and Grote, U. (2000). *Does decentralization serve the poor?* (IMF Conference on Fiscal Decentralization Paper). Washington D.C: IMF.
- Yao, Guevera Assamoi. (2007). *Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence*. Economics Dissertations Georgia State University

Xavier, I., Lin, L., & Thirtle, C., & Wiggins, S. (2001). *Agricultural Productivity Growth and Poverty Alleviation*. *Development Policy Review*, 2001, 19 (4): 449-466.

Zhang, L., Fan, S., & Xiaobo Zhang. (2004). *Reforms, Investment, and Poverty in Rural China*. *Economic Development and Cultural Change*.(January 2004): 395-421.

Lampiran 1 Analisa Pemilihan Model

OLS

```
. eststo OLS: reg pov l1.DD l1.ADD l1.PAD l1.BK l1.APBD l1.rasio_BM PDRB
growth_popdes popdes rasio_labor rasio_old educ raskin
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	3,649
Model	114417.348	13	8801.33443	F(13, 3635)	=	47.98
Residual	666818.486	3,635	183.443875	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.1465
				Adj R-squared	=	0.1434
Total	781235.834	3,648	214.15456	Root MSE	=	13.544

	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pov						
DD						
L1.	.0135415	.0050422	2.69	0.007	.0036556	.0234273
ADD						
L1.	-.0071194	.0089961	-0.79	0.429	-.0247573	.0105186
PAD						
L1.	.1093286	.0241339	4.53	0.000	.0620112	.156646
BK						
L1.	.0178543	.0095411	1.87	0.061	-.0008522	.0365607
APBD						
L1.	-.002301	.0006834	-3.37	0.001	-.0036409	-.0009611
rasio_BM						
L1.	.0057213	.0286434	0.20	0.842	-.0504375	.0618801
PDRB						
L1.	-.0000338	.0000181	-1.87	0.062	-.0000693	1.65e-06
growth_popdes						
L1.	.1059637	.0279503	3.79	0.000	.0511639	.1607635
popdes						
L1.	6.29e-06	2.62e-06	2.40	0.016	1.15e-06	.0000114
rasio_labor						
L1.	.000827	.0000887	9.32	0.000	.0006531	.0010009
rasio_old						
L1.	-.8294002	.0925238	-8.96	0.000	-1.010804	-.6479966
educ						
L1.	-.0001492	.0000168	-8.88	0.000	-.0001821	-.0001162
raskin						
L1.	.0000145	2.69e-06	5.38	0.000	9.22e-06	.0000198
_cons						
L1.	23.66581	1.105439	21.41	0.000	21.49846	25.83315

Random Effect

```
. eststo REM: xtreg pov l1.DD l1.ADD l1.PAD l1.BK l1.APBD l1.rasio_BM PDRB
growth_popdes popdes r
> asio_labor rasio_old educ raskin
```

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	3,649
Group variable: kabkota	Number of groups	=	475
R-sq:	Obs per group:		
within = 0.2223	min =		1
between = 0.0931	avg =		7.7
overall = 0.1161	max =		8
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(13)	=	942.14
	Prob > chi2	=	0.0000

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
pov						
DD						
L1.	-.0009676	.0035467	-0.27	0.785	-.007919	.0059838
ADD						
L1.	.0088345	.006567	1.35	0.179	-.0040365	.0217055
PAD						
L1.	.048442	.0199377	2.43	0.015	.0093648	.0875193
BK						
L1.	-.0027447	.0065867	-0.42	0.677	-.0156544	.010165
APBD						
L1.	-.0057517	.0005802	-9.91	0.000	-.0068889	-.0046145
rasio_BM						
L1.	.0094678	.0230725	0.41	0.682	-.0357535	.0546892
PDRB	.0000537	.0000292	1.84	0.066	-3.62e-06	.0001109
growth_popdes	.0789718	.0163424	4.83	0.000	.0469413	.1110023
popdes	.0000182	3.20e-06	5.71	0.000	.000012	.0000245
rasio_labor	.0004692	.0000658	7.14	0.000	.0003404	.0005981
rasio_old	-1.092445	.1518598	-7.19	0.000	-1.390085	-.794805
educ	-.0001585	.0000223	-7.12	0.000	-.0002022	-.0001149
raskin	3.78e-07	1.77e-06	0.21	0.831	-3.09e-06	3.85e-06
_cons	28.19527	1.325434	21.27	0.000	25.59747	30.79307
sigma_u	11.54586					
sigma_e	7.2466163					
rho	.71739664	(fraction of variance due to u_i)				

LM-test

Untuk memilih model antara *OLS* dan *Random Effect*

```
. xttest0
```

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

```
pov[kabkota,t] = Xb + u[kabkota] + e[kabkota,t]
```

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
pov	214.1546	14.63402
e	52.51345	7.246616
u	133.3069	11.54586

Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 5518.90
Prob > chibar2 = 0.0000

Karena nilai probabilitas > chibar2 maka model yang digunakan dalam penelitian antara *Random Effect* atau *Fixed Effect*.

Fixed Effect

```
. eststo FEM: xtreg pov l1.DD l1.ADD l1.PAD l1.BK l1.APBD l1.rasio_BM PDRB
growth_popdes popdes rasio_labor rasio_old educ raskin, fe
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =    3,649
Group variable: kabkota                Number of groups =     475
```

```
R-sq:                                Obs per group:
  within = 0.2329                      min =          1
  between = 0.0257                     avg =          7.7
  overall = 0.0330                      max =          8
```

```
corr(u_i, Xb) = -0.6785                F(13,3161)      =    73.83
                                          Prob > F        =    0.0000
```

	pov	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
DD	L1.	-.0029509	.0036282	-0.81	0.416	-.0100648 .0041629
ADD	L1.	.0055562	.0067337	0.83	0.409	-.0076467 .0187591
PAD	L1.	.0204205	.0208227	0.98	0.327	-.0204068 .0612478
BK	L1.	-.008241	.0067338	-1.22	0.221	-.021444 .004962
APBD	L1.	-.0058509	.000631	-9.27	0.000	-.0070881 -.0046137
rasio_BM	L1.	.017879	.0238031	0.75	0.453	-.028792 .0645501
PDRB		.0000748	.0000568	1.32	0.188	-.0000365 .0001861
growth_popdes		.0955015	.0165613	5.77	0.000	.0630296 .1279734
popdes		-.000023	7.92e-06	-2.91	0.004	-.0000386 -7.51e-06
rasio_labor		.0004235	.0000679	6.24	0.000	.0002905 .0005566
rasio_old		-1.5243	.2233969	-6.82	0.000	-1.962317 -1.086282
educ		-.0001313	.0000261	-5.04	0.000	-.0001824 -.0000803
raskin		8.67e-07	1.80e-06	0.48	0.631	-2.67e-06 4.40e-06
_cons		41.74142	2.511389	16.62	0.000	36.8173 46.66554
sigma_u		17.379223				
sigma_e		7.2466163				
rho		.8518874	(fraction of variance due to u_i)			

```
F test that all u_i=0: F(474, 3161) = 20.12                Prob > F = 0.0000
```

Hausman-test

Untuk memilih model antara *Random Effect* dan *Fixed Effect*

```
. hausman FEM REM
```

Note: the rank of the differenced variance matrix (8) does not equal the number of coefficients being tested (13); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test. Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

---- Coefficients ----				
	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	FEM	REM	Difference	S.E.
DD				
L1.	-.0029509	-.0009676	-.0019833	.0007648
ADD				
L1.	.0055562	.0088345	-.0032783	.0014893
PAD				
L1.	.0204205	.048442	-.0280216	.0060058
BK				
L1.	-.008241	-.0027447	-.0054963	.0013996
APBD				
L1.	-.0058509	-.0057517	-.0000992	.000248
rasio_BM				
L1.	.017879	.0094678	.0084112	.0058518
PDRB	.0000748	.0000537	.0000212	.0000487
growth_pop~s	.0955015	.0789718	.0165297	.0026836
popdes	-.000023	.0000182	-.0000413	7.25e-06
rasio_labor	.0004235	.0004692	-.0000457	.0000168
rasio_old	-1.5243	-1.092445	-.4318548	.1638437
educ	-.0001313	-.0001585	.0000272	.0000135
raskin	8.67e-07	3.78e-07	4.89e-07	3.42e-07

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
 = 65.84
 Prob>chi2 = 0.0000
 (V_b-V_B is not positive definite)

Karena nilai probabilitas > chi2 maka model yang digunakan dalam penelitian adalah *Fixed Effect*

Lampiran 2 Hasil Estimasi Regresi Model Terbaik dengan Stata

Model 5

```
. eststo FE4: xtreg miskinkabkota l1.DD l1.ADD l1.PAD l1.BK l1.APBD l1.rasio_BM
PDRB growth_popdes popdes rasio_labor rasio_old educ raskin i.id_year
i.pulau_thn, fe
```

```
note: 18.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 27.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 36.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 45.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 54.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 56.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 57.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 58.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 59.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 60.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 61.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 62.pulau_thn omitted because of collinearity
note: 63.pulau_thn omitted because of collinearity
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs      =      3,649
Group variable: kabkota                Number of groups   =      475
```

```
R-sq:                                  Obs per group:
  within = 0.4767                       min =      1
  between = 0.5203                      avg =      7.7
  overall = 0.4793                      max =      8
```

```
corr(u_i, Xb) = 0.3143                  F(62,3112)        =      45.73
                                          Prob > F          =      0.0000
```

miskinkabkota	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
DD						
L1.	-60.35082	12.2849	-4.91	0.000	-84.43816	-36.26349
ADD						
L1.	-55.56354	20.43912	-2.72	0.007	-95.63907	-15.48801
PAD						
L1.	-63.72361	60.66125	-1.05	0.294	-182.6637	55.21652
BK						
L1.	-125.7394	23.06048	-5.45	0.000	-170.9547	-80.52413
APBD						
L1.	-4.42739	2.055661	-2.15	0.031	-8.457979	-.3968003
rasio_BM						
L1.	-1.941865	70.85282	-0.03	0.978	-140.8649	136.9811
PDRB	.1255756	.1627212	0.77	0.440	-.1934763	.4446275
growth_popdes	33.25886	48.61184	0.68	0.494	-62.05566	128.5734
popdes	.1002681	.0231225	4.34	0.000	.0549313	.145605
rasio_labor	.4303181	.1923437	2.24	0.025	.0531846	.8074515
rasio_old	326.2867	836.9219	0.39	0.697	-1314.688	1967.262
educ	-.7153127	.0763909	-9.36	0.000	-.8650944	-.565531
raskin	.049931	.0066112	7.55	0.000	.0369681	.0628938
id_year						

2012		2448.602	4856.493	0.50	0.614	-7073.653	11970.86
2013		1256.909	4909.751	0.26	0.798	-8369.771	10883.59
2014		-1050.069	5076.34	-0.21	0.836	-11003.38	8903.245
2015		619.0729	4975.065	0.12	0.901	-9135.669	10373.81
2016		4792.497	4995.19	0.96	0.337	-5001.706	14586.7
2017		2101.704	5166.251	0.41	0.684	-8027.902	12231.31
2018		6899.335	5328.278	1.29	0.195	-3547.96	17346.63
pulau_thn							
3		-2940.728	5414.299	-0.54	0.587	-13556.69	7675.232
4		-8629.775	5470.897	-1.58	0.115	-19356.71	2097.158
5		-10889.84	5601.361	-1.94	0.052	-21872.57	92.90204
6		-16315.73	5462.18	-2.99	0.003	-27025.57	-5605.89
7		-10512.8	5411.147	-1.94	0.052	-21122.58	96.97613
8		-11414.59	5454.21	-2.09	0.036	-22108.81	-720.3766
9		-9655.628	5543.908	-1.74	0.082	-20525.72	1214.46
11		36193.9	6725.727	5.38	0.000	23006.59	49381.21
12		27108.65	6430.753	4.22	0.000	14499.7	39717.6
13		1866.857	6431.69	0.29	0.772	-10743.93	14477.64
14		-8982.997	6429.953	-1.40	0.162	-21590.38	3624.384
15		-23290.58	6151.222	-3.79	0.000	-35351.45	-11229.72
16		-8639.415	5955.555	-1.45	0.147	-20316.63	3037.8
17		-12650.25	5649.228	-2.24	0.025	-23726.84	-1573.658
18		0	(omitted)				
20		14932.63	7353.922	2.03	0.042	513.6035	29351.67
21		12214.79	7209.958	1.69	0.090	-1921.97	26351.54
22		13235.5	7211.486	1.84	0.067	-904.2518	27375.25
23		7308.684	7212.806	1.01	0.311	-6833.656	21451.02
24		-6994.982	7110.528	-0.98	0.325	-20936.78	6946.818
25		-1873.057	6952.096	-0.27	0.788	-15504.22	11758.1
26		2173.099	6856.417	0.32	0.751	-11270.46	15616.66
27		0	(omitted)				
29		-207.3372	6335.866	-0.03	0.974	-12630.24	12215.56
30		-1779.749	6242.342	-0.29	0.776	-14019.27	10459.78
31		-393.8899	6304.821	-0.06	0.950	-12755.92	11968.14
32		845.6212	6277.286	0.13	0.893	-11462.42	13153.66
33		-2093.124	6091.714	-0.34	0.731	-14037.31	9851.062
34		2969.762	5964.824	0.50	0.619	-8725.628	14665.15
35		2858.306	5911.408	0.48	0.629	-8732.348	14448.96
36		0	(omitted)				
38		12636.78	6002.822	2.11	0.035	866.8878	24406.67
39		10947.16	5855.447	1.87	0.062	-533.7714	22428.09
40		9473.266	5884.126	1.61	0.108	-2063.897	21010.43
41		8247.724	5905.947	1.40	0.163	-3332.224	19827.67
42		-490.5486	5775.331	-0.08	0.932	-11814.39	10833.3
43		1389.672	5625.177	0.25	0.805	-9639.762	12419.11
44		670.9588	5534.582	0.12	0.904	-10180.84	11522.76
45		0	(omitted)				
47		2515.546	8004.264	0.31	0.753	-13178.63	18209.72
48		-184.0175	7916.902	-0.02	0.981	-15706.9	15338.86
49		-1950.655	7930.197	-0.25	0.806	-17499.6	13598.29
50		-3074.177	7965.178	-0.39	0.700	-18691.71	12543.36
51		-6114.186	7871.694	-0.78	0.437	-21548.43	9320.054
52		-2213.605	7708.355	-0.29	0.774	-17327.58	12900.37
53		-1476.294	7663.657	-0.19	0.847	-16502.63	13550.04
54		0	(omitted)				
56		0	(omitted)				
57		0	(omitted)				
58		0	(omitted)				
59		0	(omitted)				
60		0	(omitted)				
61		0	(omitted)				
62		0	(omitted)				
63		0	(omitted)				

```
      _cons |      34368.87   9551.156      3.60   0.000   15641.67   53096.08
-----+-----
      sigma_u |  37955.491
      sigma_e |  20067.994
      rho |  .78152508   (fraction of variance due to u_i)
-----+-----
F test that all u_i=0: F(474, 3112) = 14.28           Prob > F = 0.0000
```

Lampiran 3

Statistik F dengan Membandingkan Dua Model

Membandingkan Model 4 dan Model 5

Model 4

$$\begin{aligned} \text{POV}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{DD}_{it-1} + \alpha_2 \text{ADD}_{it-1} + \alpha_3 \text{rasio_PAD}_{it-1} + \alpha_4 \text{BK}_{it-1} + \\ & \alpha_5 \text{APBD}_{it-1} + \alpha_6 \text{rasio_BM}_{it-1} + \alpha_7 \text{PDRB}_{it} + \alpha_8 \text{growth_popdes}_{it} + \\ & \alpha_9 \text{popdes}_{it} + \alpha_{10} \text{rasio_labor}_{it} + \alpha_{11} \text{rasio_old}_{it} + \alpha_{12} \text{educ}_{it} + \alpha_{13} \text{raskin}_{it} + \\ & \beta_1 \text{Dyear} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Model 5

$$\begin{aligned} \text{POV}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{DD}_{it-1} + \alpha_2 \text{ADD}_{it-1} + \alpha_3 \text{rasio_PAD}_{it-1} + \alpha_4 \text{BK}_{it-1} + \\ & \alpha_5 \text{APBD}_{it-1} + \alpha_6 \text{rasio_BM}_{it-1} + \alpha_7 \text{PDRB}_{it} + \alpha_8 \text{growth_popdes}_{it} + \\ & \alpha_9 \text{popdes}_{it} + \alpha_{10} \text{rasio_labor}_{it} + \alpha_{11} \text{rasio_old}_{it} + \alpha_{12} \text{educ}_{it} + \alpha_{13} \text{raskin}_{it} + \\ & \beta_1 \text{Dyear} + \beta_2 \text{Dpulau_tahun} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_2 = 0$ (model 4 karena restriksi pada β_2)

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ (model 5 karena tidak adanya restriksi pada β_2)

Akibat dari restriksi ini peneliti memiliki modifikasi dari Model 4 menjadi Model 5, maka uji F statistik untuk membandingkan antara dua model adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(0,477 - 0,421)/55}{(1 - 0,477)/(3649 - 75)} = 6,96$$

Karena nilai $F_{hitung} = 6,96$ dan $F_{tabel} = 1,91$ pada level signifikansi 5% sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka tolak H_0 sehingga model terbaik adalah **Model 5**

Lampiran 4
Robustness Check

Pada penelitian ini telah dilakukan *robustness check* dengan mengganti variabel dependen menjadi persentase jumlah penduduk miskin pedesaan.

	Model (1)	Model (2)	Model (3)	Model (4)	Model (5)
	OLS	FE	FE	FE	FE
	pov	pov	pov	pov	pov
L1.DD	-0.031*** (0.004)	-0.005 (0.003)	-0.005 (0.004)	-0.002 (0.004)	-0.002 (0.004)
L1.ADD			0.008 (0.007)	0.008 (0.007)	0.001 (0.007)
L1.Rasio_PAD			0.002 (0.020)	0.002 (0.020)	-0.021 (0.021)
L1.BK			-0.005 (0.008)	-0.006 (0.007)	-0.005 (0.008)
L1.APBD			-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)
L1.rasio_BM			-0.010 (0.023)	-0.015 (0.023)	-0.007 (0.024)
PDRB				0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
growth_popdes				0.042** (0.016)	0.043*** (0.016)
popdes				0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
rasio_labor sektor				0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)
rasio_old				0.958*** (0.257)	1.150*** (0.284)
educ				-0.000*** (0.000)	-0.000*** (0.000)
raskin				0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
_cons	16.758*** (0.272)	22.909*** (0.335)	23.451*** (0.638)	17.476*** (2.746)	17.058*** (3.237)

<i>N</i>	3725	3725	3725	3649	3649
<i>r</i> ²	0.019	0.288	0.289	0.312	0.335
<i>r</i> ² _a	0.019	0.182	0.182	0.204	0.220
<i>F</i>	71.630	164.209	101.282	71.425	25.242
<i>p</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
tahun_fe	no	yes	yes	yes	yes
pulau_tahun	no	no	no	no	yes

Standard errors in parentheses

* $p < .1$, ** $p < .05$, *** $p < .01$

Karena koefisien variabel interest tetap negatif (konsisten) ketika diganti variabel dependen menjadi persentase jumlah penduduk miskin pedesaan maka model sudah robust.